

---

# RENCANA KERJA

---

2018



# DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Pasanggrahan No. 03 Desa Cimanggu Palabuhanratu

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Renja yang merupakan turunan dari Renstra sebagai penjabaran atas Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi adalah dokumen penting yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) harus disusun dan ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam setiap tahunnya.

Kiranya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi, daya saing dan pelayanan publik.

Sukabumi, 30 Desember 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Sukabumi



Ir. Lukman Sudrajat  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650731 199403 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.....	6
2.2 Analisis Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum .....	7
2.3 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum.....	8
2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan.....	8
2.3.2 Kinerja Pelayanan Bidang Bina Marga.....	8
2.3.3 Kinerja Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium.....	21
2.3.4 Kinerja Pelayanan Bidang pengairan.....	22
2.3.5 Kinerja Pelayanan Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan .....	42
2.3.6 Kinerja Pelayanan UPTD.....	84
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum..	84
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	85
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	88
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	89
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	89
3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 .....	89
3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga .....	98
3.3.3 Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Air.....	102
3.3.4 Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	103
3.3.5 Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Tata Bangunan.....	104
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	105
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	105
3.6 Program dan Kegiatan .....	113
BAB IV PENUTUP.....	121



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum harus menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Renja Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 1(satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai Tupoksinya.

Naskah Rencana KerjaRenja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja tahunan,

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 52 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.
27. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini antara lain adalah:



Maksud:

Maksud disusunnya Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai Tupoksinya.

Tujuan:

- A. Mewujudkan konsistensi perencanaan tahunan teknis Dinas Pekerjaan Umum dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
- B. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUMTAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV PENUTUP.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS PEKERJAAN UMUM Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM berdasarkan sasaran/target Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM. Kinerja pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM disajikan dalam dengan format dan adapun pencapaian program selama 5 (lima) tahun, ditunjukkan pada tabel berikut sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM  
Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015*
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tingkat kemantapan jalan/jembatan	Peningkatan kondisi jalan kabupaten	Km	70,170	62,034	99,710	113,345	60
	Pembangunan jalan kabupaten	Km	0	0	0	0	0
	Pembangunan jalan desa	Km	103,442	81,777	72,204	59,92	50
	Peningkatan kondisi jembatan kabupaten	Unit	7	13	10	13	6
	Pembangunan jembatan kabupaten	Unit	3	0	1	0	0
	Pembangunan jembatan desa	Unit	18	4	6	3	3
Meningkatnya tingkat kemantapan jalan/jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	239,960	410,600	510,226	400,614	115
	Pemeliharaan Periodik Jalan	Km	26,15	49,12	46,00	22,15	12
	Pemeliharaan Kondisi Jembatan	Unit	13	32	41	36	14
	Pemeliharaan Kondisi Jembatan	Unit	13	32	41	36	14



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM

Sesuai tupoksi DINAS PEKERJAAN UMUM melaksanakan salah satu Program RPJMD yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Jalan dan Jembatan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya
9. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
12. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Dengan tujuan antara lain :

Adapun Tujuan dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air
4. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi



Proses penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sebagai kelanjutan dari penyusunan faktor-faktor kunci keberhasilan. Setiap faktor kunci keberhasilan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan. Setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran- sasaran dan setiap sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan dijabarkan kedalam program-program.

### **2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan pelayanan yang cukup luas. Pelayanan yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian besar, yaitu kesekretariatan, bidang bina marga, bidang pengairan, bidang Bangunan dan penyehatan Lingkungan, bidang alat berat dan laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Adapun kinerja pelayanan setiap kelompok dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan**

Pelayanan kesekretariatan secara umum adalah menyangkut penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum, keuangan, dan perencanaan dan program. Pelayanan kesekretariatan selama ini berjalan cukup lancar, walaupun terkadang terdapat kendala yang berakibat pada terjadinya sedikit keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Hal ini disebabkan diantaranya oleh keterbatasan kemampuan SDM, peralatan, dan pendanaan.

Salah satu tugas terberat kesekretariatan adalah dalam hal pengelolaan aset dan perencanaan dan penyusunan program. Tugas ini menyangkut manajemen pengelolaan infrastruktur yang sangat besar nilainya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kapabel dan sumber daya lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesekretariatan secara keseluruhan.

#### **2.3.2. Kinerja Pelayanan bidang bina marga.**

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga menjalankan 2(dua) program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Program Jalan dan Jembatan;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

#### **Isu Strategis**

- Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan;
- Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya;



- Kabupaten Sukabumi masih merupakan daerah tertinggal;
- Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi;
- Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
- Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular;
- Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) serta pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung pengembangan sistem perkotaan/pusat-pusat pertumbuhan.

#### **Latar Belakang**

- Penetapan skala prioritas penanganan infrastruktur masih belum sesuai dengan target yang diharapkan;
- Pendanaan yang sangat kurang, sehingga selalu terjadi *backlog*. *Backlog* terjadi setiap tahun, membuat *backlog* tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya;
- Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus dibangun;
- Perlu dicari cara untuk meningkatkan kondisi infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya, agar dapat mendukung sistem sosial-ekonomi masyarakat untuk mencapai target IPM;
- Peningkatan kondisi infrastruktur tersebut diusahakan dan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Kabupaten;
- Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
- Masih banyaknya ruas jalan yang berkategori tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun), terutama yang kondisinya 'rusak/rusak berat' yang memerlukan 'pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda empat
- Tindakan pemeliharaan (preventif) jauh lebih murah dari pada tindakan rehabilitasi/peningkatan (*reactive*);
- Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan;



- Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) serta pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan/Pusat-pusat Pertumbuhan.
- Pendanaan yang sangat kurang, sehingga selalu terjadi *backlog*. *Backlog* terjadi setiap tahun, membuat *backlog* tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya;
- Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus dibangun;
- Perlu dicari cara untuk meningkatkan kondisi infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya, agar dapat mendukung sistem sosial-ekonomi masyarakat untuk mencapai target IPM;
- Peningkatan kondisi infrastruktur tersebut diusahakan dan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Kabupaten;
- Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
- Mempertahankan ruas jalan berkategori mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah 'baik/sedang' yang hanya memerlukan pemeliharaan;
- Masih banyaknya ruas jalan berkategori tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya 'rusak/rusak berat' yang memerlukan 'pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4.

### **Tujuan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian dengan sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air
3. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman



4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan
5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi

Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 2 Pencapaian Program Bidang Binamarga**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	42.85	51.112	119.281
2	Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	0	0	0
3	Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang)	Dok	1	0	0
4	ketersediaan sarana pengelolaan jalan	Unit	6	0	0
5	Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak)	Dok	1	1	100
6	Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok)	Dok	0	0	0
7	Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer)	Dok	1	1	100
8	Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng)	Dok	0	0	0
9	Pelayanan informasi tentang Infrastruktur	Dok	5	4	80

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2016, bidang bina marga memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu; Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan beberapa indikator kinerja, diantaranya;

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target sebesar 42.85% dan dapat di ralisasikan sebesar 51.112% atau Presentase yang di capai adalah 119.281% dengan program jalan dan jembatan yang mana pada RPJMD 2016 – 2012 hanya 1 program tetapi pada Sistem Informasi Daerah (Simda) masih menggunakan program yang lama yaitu; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 154.333.213.318,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 145.990.339.442,00 atau sebesar 94,59%. Pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut;
  - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa (PIK Sektor)



- dengan anggaran Rp. 18.641.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.746.247.000,00 atau 95,20%.
- b. Peningkatan Jalan DAK untuk Transportasi Perdesaan dengan anggaran Rp. 2.720.779.950,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.551.192.950,00 atau 93,77%.
  - c. Peningkatan/Pembangunan Jalan dengan anggaran Rp. 9.591.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.395.356.000,00 atau 97,95%.
  - d. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (DBH Pajak Rokok) dengan anggaran Rp. 27.009.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.368.072.000,00 atau 93,92%.
  - e. Perencanaan Jalan dengan anggaran Rp. 900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 856.180.000,00 atau 95,13%.
  - f. Perencanaan Jembatan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 99.240.000,00 atau 99,24%.
  - g. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) dengan anggaran Rp. 19.672.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.491.281.592,00 atau 94,00%.
  - h. Peningkatan Jalan/Jembatan Dana Intensif Daerah (DID) dengan anggaran Rp. 12.032.687.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.298.737.000,00 atau 93,90%.
  - i. Peningkatan Ruas Jalan Cimahpar - Cipamengkas Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 1.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.107.293.000,00 atau 92,27%.
  - j. Peningkatan Jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Palabuhanratu (PON XIX) (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 4.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.007.903.000,00 atau 95,43%.
  - k. Peningkatan Ruas Jalan Kadaleman - Surade (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 1.450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.339.725.000,00 atau 92,39%.
  - l. Peningkatan Ruas Jalan Bojong Genteng - Bojong Sari (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.386.250.000,00 atau 95,45%.
  - m. Peningkatan Ruas Jalan Lengkong - Mataram (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.891.038.000,00 atau 94,55%.



- n. Pembangunan Jembatan Ciseureuh (Jampangkulon-Kalibunder) Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 2.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.048.650.000,00 atau 95,29%.
- o. Peningkatan Ruas Jalan Cipalayanan - Cibodas (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 599.930.000,00 atau 92,30%.
- p. Dana Alokasi Khusus (DAK Tambahan) dengan anggaran Rp. 46.834.592.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 44.250.199.000,00 atau 94,48%.
- q. Infrastruktur Jalan (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 1.986.848.273,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.875.770.000,00 atau 94,41%.
- r. Transportasi Pedesaan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 379.045.095,00 dan realisasi sebesar Rp. 366.095.000,00 atau 96,58%.
- s. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Bidang Infrastruktur Jalan (P2D2 2016) dengan anggaran Rp. 313.711.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 311.179.900,00 atau 99,19%.

Sedangkan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 23.716.628.744,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 22.413.579.000,00 atau sebesar 94,51% pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut;

- a. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan dengan anggaran Rp. 8.555.523.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.431.419.000,00 atau 98,55%.
- b. Pemeliharaan Periodik Jalan dengan anggaran Rp. 2.680.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.569.316.000,00 atau 95,85%.
- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten dengan anggaran Rp. 350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 341.032.000,00 atau 97,44%.
- d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran Rp. 7.049.730.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.031.228.000,00 atau 99,74%.



- e. Pemeliharaan Jalan Perkotaan Pelabuhanratu (DBHCHT 2016) dengan anggaran Rp. 250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 243.577.000,00 atau 97,43%.
- f. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 658.375.744,00 dan realisasi sebesar Rp. 642.962.000,00 atau 97,66%.
- g. Pembangunan TPT Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Jl. Raya Sukabumi - Cianjur Km 11 Sukalarang Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 122.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan bukan kewenangan dinas bina marga kabupaten sukabumi.
- h. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Situgunung Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 429.950.000,00 atau 95,54%.
- i. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukaraja - Gegerbitung Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 285.193.000,00 atau 95,06%.
- j. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimuncang - Baros Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.325.000,00 atau 96,16%.
- k. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Rambay - Cipeundeuy Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 96.367.000,00 atau 96,37%.
- l. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukabumi - Selabintan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan kegiatan tersebut sudah teralokasikan ABPN (DAK Tambahan 2016).
- m. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Batas Kota - Babakan Jawa Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan kegiatan tersebut sudah teralokasikan ABPN (DAK Tambahan 2016).



- n. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Cibencoy Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 96.514.000,00 atau 96,51%.
- o. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cikaret - Cipari Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.683.000,00 atau 96,34%.
- p. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cipaku - Ujunggenteng Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 186.817.000,00 atau 93,41%.
- q. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Karangtengah - Cireundeu Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 193.716.000,00 atau 96,86%.
- r. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimahi - Bojong Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 96.138.000,00 atau 96,14%.
- s. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Caringin - Cidahu Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan kegiatan tersebut sudah teralokasikan ABPN (DAK Tambahan 2016).
- t. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Parungkuda - Pakuwon Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 140.274.000,00 atau 96,32%.
- u. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cimelati Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.633.000,00 atau 96,34%.
- v. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cibilik Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.683.000,00 atau 93,97%.
- w. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cibeber - Nangerang Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp.

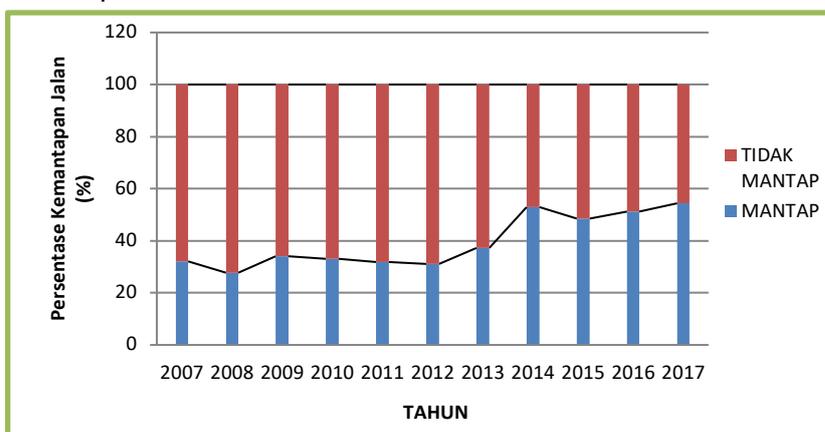


- 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 193.841.000,00 atau 96,92%.
- x. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Benda - Manggis Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.104.000,00 atau 95,05%.
  - y. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Baros - Cikadu Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 479.548.000,00 atau 95,91%.
2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.
  3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja – Sukalarang) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan tidak dapat diserap dikarenakan gagal lelang dan pada waktu perubahan waktu yang di rencanakan tidak mencukupi untuk pengadaan konsultan dokumen Fisibility Study (FS) Sukaraja – Sukalarang.
  4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.
  5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug – Cibadak) dapat terselesaikannya Dokumen Fisibility Study (FS) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen FS atau persentase yang di capai 100% dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.025.000,00 atau 92,68%.
  6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu – Cisolok) dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.
  7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun – Balewer) dapat terselesaikannya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)



- sehingga target sebesar 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen AMDAL atau persentase yang di capai 100% dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.025.000,00 atau 92,68%.
8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.
  9. Pelayanan informasi tentang Infrastruktur mempunyai target sebesar 5 Dokumen dan dapat di ralisasi sebanyak 4 Dokumn atau Presentase yang di capai adalah 80% dengan anggaran Rp. 404.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 383.140.000,00 atau 94,84%. 1 dokumen tidak dapat tercapai dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.

Pada tahun 2007 kemantapan jalan kabupaten berada pada 31.11% sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 27.73% Pada tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami trend kenaikan kemantapan jalan mulai dari 34.07% sampai dengan 52.94% sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan kemantapan jalan dikarenakan anggran yang di berikan belum cukup meadai dari apa yang telah direncanakan. Sehingga pada tahun 2016 kemantapan jalan sebesar 51.112% dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan untuk meningkatkan kemantapan jalan sesuai dengan program nasional yang sejalan dengan program daerah. Di bawah ini dapat dilihat Gambar II. 1 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan dari tahun 2007 – 2016.



Gambar II.1 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan



### **Permasalahan**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi serta banyaknya jalan yang rusak sehingga belum optimalnya pekerjaan.
- b. Sumber dana yang belum memadai sehingga keterbatasan anggaran yang tidak seimbang sehingga pencapaian target kinerja pembangunan infrastruktur kurang optimal.
- c. Faktor cuaca yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang teknis sehingga pencapaian target sasaran pembangunan belum optimal.
- e. Terdapat lalulintas dengan muatan berlebih. Kombinasi dari kurangnya anggaran dan adanya muatan berlebih merupakan factor terjadinya under design (desain yang berada dibawah kebutuhan) sehingga mengakibatkan kondisi jalan cepat rusak, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya tingkat kemantapan jalan sesuai dengan target.
- f. Terjadinya pengalokasian anggaran yang kurang berimbang antara peningkatan jalan kabupaten dengan peningkatan jalan desa. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya target kemantapan jalan kabupaten dan terlampauinya target penanganan jalan desa.
- g. Pada program ini terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu tidak tercapainya kemantapan jalan dan terlampauinya target pembangunan jalan desa. Keduanya merupakan deviasi dari target dengan deviasi yang cukup besar. Masalahnya adalah disatu sisi target tidak tercapai, tetapi disisi lain terdapat kegiatan yang jauh melampaui target. Masalah tersebut terjadi karena sangat sedikitnya ruas jalan yang mendapat program peningkatan jalan sehingga peningkatan kondisi yang dicapai tidak cukup signifikan untuk meningkatkan kemantapan jalan menjadi sesuai dengan target.
- h. Alokasi anggaran pemeliharaan rutin jalan yang sangat jauh dibawah pagu indikatif (dana yang dibutuhkan). Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan kondisi. Selain itu dengan sangat terbatasnya anggaran, maka jumlah ruas jalan yang dapat dipertahankan kondisinya menjadi sangat sedikit.
- i. Banyaknya system drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain adanya penyimpangan



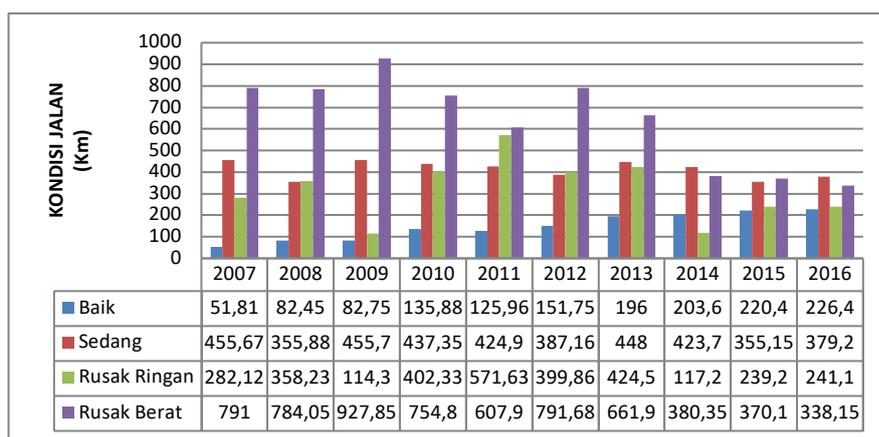
penggunaan RMJ, tertutupnya saluran drainase jalan karena banyaknya pemukiman yang merapat ke jalan, dll.

### **Solusi**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah:

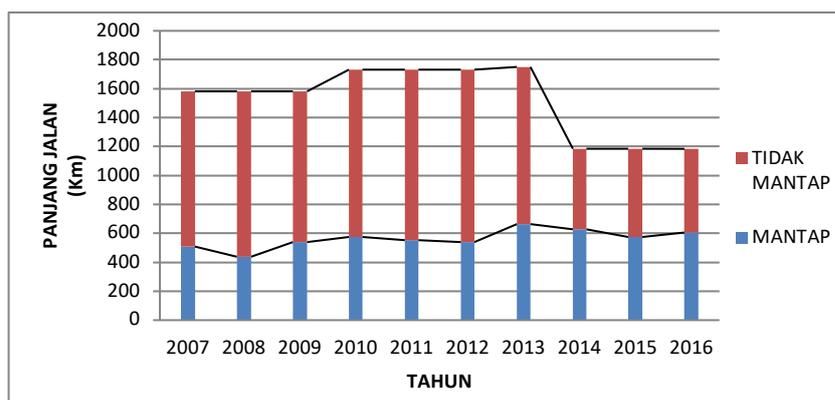
- a. Diusulkan kembali pada tahun berikutnya serta adanya penambahan anggaran agar pencapaian target sesuai dengan apa yang direncanakan
- b. Menambah alokasi dana yang memadai bagi peningkatan jalan kabupaten serta membuat alokasi anggaran yang berimbang bagi kegiatan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa, disesuaikan dengan target capaian kinerjanya.
- c. Mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan kegiatan yang lebih awal.
- d. Perlu diadakannya diklat teknis untuk menunjang didalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
- e. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar para pengguna sarana dan prasarana pembangunan untuk lebih peduli pada hasil pembanunan yang telah dilaksanakan.
- f. Melakukan sosialisasi anti muatan berlebih, karena muatan berlebih akan berdampak pada mempercepat kerusakan jalan.
- g. Memberikan prioritas tertinggi bagi pemeliharaan jalan dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan, sebelum dialokasikan pada peningkatan jalan.
- h. Mengoptimalkan fungsi drainase jalan dengan cara antara lain: memperketat pengendalian dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB), memberikan pengertian dan sosialisasi penggunaan ruang milik jalan, dll.
- i. Mengajak masyarakat untuk ikut memelihara jalan dengan cara memelihara saluran drainase dilingkungannya.

Kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dilihat salah satunya dari perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun ke tahun. Kondisi jalan kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dan kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan dan rusak berat). Perkembangan Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2015 dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dengan melihat kriteria tersebut, maka kondisi yang diinginkan (yang menjadi target) adalah panjang jalan dengan kondisi jalan mantap.



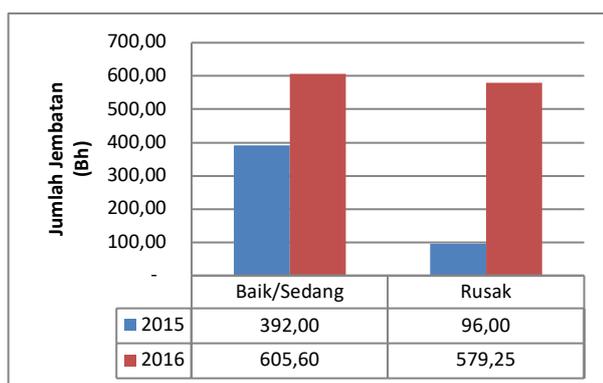
**Gambar II. 2 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten Sukabumi**

Perkembangan kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2016 dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten relatif tetap, berkisar pada kondisi 30% jalan mantap. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dikatakan kurang karena pencapaian kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2016 relatif tetap, artinya penambahan kemantapan jalan kabupaten **tidak signifikan**.



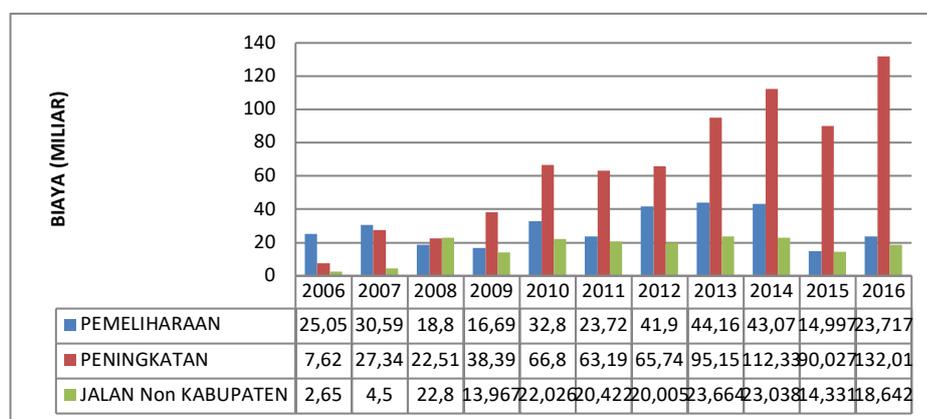
**Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten**

Sedangkan perkembangan kemantapan jembatan kabupaten pada tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dari gambar tersebut, jumlah jembatan kabupaten sebanyak 488 buah jembatan atau sepanjang 3383,35 meter. Kondisi kemantapan jembatan kabupaten yang baik/sedang 392 buah jembatan atau sepanjang 2539,15 meter dan kondisi rusak 96 buah jembatan atau sepanjang 844,20 meter.



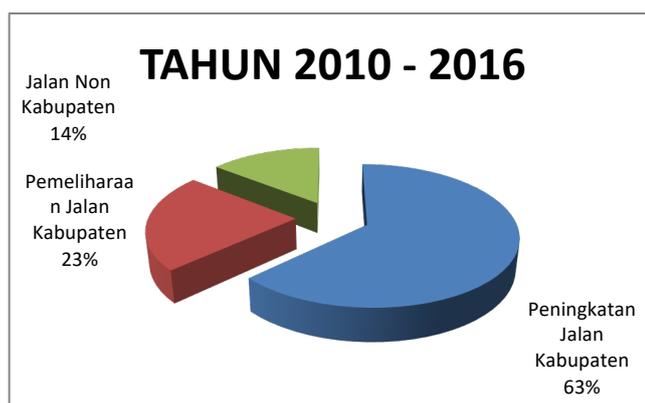
Gambar II. 4 Perkembangan Kemantapan Jembatan Kabupaten

Kondisi perkembangan kemantapan jalan yang kurang signifikan tersebut dapat dimengerti karena alokasi dana untuk penanganan jalan kabupaten dari tahun 2006 sampai 2016 **selalu tidak memenuhi kebutuhan (terjadi backlog)**. Perkembangan alokasi dana untuk penanganan jalan tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten.



Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten

Apabila dikaitkan dengan terjadinya *backlog* tersebut, maka kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dinilai cukup, mengingat alokasi dana yang dibutuhkan untuk menangani jalan kabupaten selalu tidak memenuhi kebutuhan, sehingga kemantapan jalan kabupaten sulit untuk ditingkatkan secara signifikan seperti pada Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten



**Gambar II. 6 Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan**

Selain menangani jalan kabupaten, Dinas Bina Marga juga menangani jalan desa. Perkembangan penanganan jalan desa dari tahun 2006 sampai 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan kebinamargaan untuk penanganan jalan desa dapat dikatakan baik. Ini dapat dilihat pada Tabel 2. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa.

**Tabel 2. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa**

No	Tahun	Panjang (Km)	Biaya (Milyar Rupiah)
1	2006	12,850	2,650
2	2007	17,350	4,500
3	2008	125,26	22,600
4	2009	44,750	13,967
5	2010	87,920	22,026
6	2011	85,530	20,422
7	2012	98,792	20,005
8	2013	77,494	23,664
9	2014	59,920	23,038
10	2015	37,273	14,331
11	2016	55,540	18,642
<b>Jumlah</b>		<b>627,149</b>	<b>171,154</b>

Sumber: Subag. Program dan Perencanaan

Sejalan dengan adanya parameter baru yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 tahun 2010, maka Dinas Bina Marga sudah melakukan usaha penerapan SPM dan evaluasi pencapaian SPM sebagaimana terlihat pada **Error! Not a valid bookmark self-reference.** berikut:



**Tabel 2. 4 Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Target Nasional		Capaian/Profil					
				Nilai	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	
III	Penyediaan Jalan untuk melayani Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase Tingkat Kondisi jalan Kabupaten/Kota Baik dan sedang	60 %	2018	48,60	51,10			
			2	Persentase Terhunjunya Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	2018	96,00	96,00			

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum khususnya bidang Bina Marga belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dalam SPM.

### 2.3.3. Kinerja Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium

#### a. Pelayanan perbengkelan dan alat berat

Pelayanan perbengkelan dan alat berat dari tahun 2006 s/d 2016 mempunyai kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan dicapainya target PAD setiap tahun. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan perbengkelan dan alat berat berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2006 s/d 2016.

**Tabel 2. 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2006	222.310.000,00	227.807.625,00	102,000
2007	298.991.000,00	305.903.465,00	102,310
2008	337.394.100,00	342.841.750,00	101,610
2009	404.386.000,00	409.349.500,00	101,230
2010	520.000.000,00	521.970.000,00	100,380
2011	565.000.000,00	568.697.000,00	100,654
2012	660.000.000,00	660.496.000,00	100,075
2013	745.000.000,00	745.568.000,00	101,001



Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2014	745.000.000,00	745.760.000,00	100,102
2015	765.000.000,00	765.580.000,00	100,076
2016	765.000.000,00	765.655.000,00	100,086

Sumber: Bidang Perbengkelan dan alat Berat

Selain pelayanan yang bersifat jasa, unit ini juga melayani kegiatan – kegiatan yang bersifat bantuan, seperti penanggulangan bencana alam. Kinerja pelayanan untuk kegiatan yang termasuk kategori ini dapat dinilai cukup baik, karena hampir semua permintaan bantuan dapat dilayani.

b. Pelayanan laboratorium

Laboratorium bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis penunjang Pelayanan laboratorium dan pengujian dari tahun 2007 s/d 2016 mempunyai kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pelayanan laboratorium dan pengujian bahan pada kegiatan –kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pada kegiatan perencanaan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, laboratorium ini juga melayani permintaan pihak lain.

Selain terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, Laboratorium ini pada tahun 2007 s/d 2016 juga diberi target dalam hal PAD. Apabila dilihat dari dicapainya target PAD setiap tahun, maka kinerja unit ini dapat dikategorikan baik. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan laboratorium dan pengujian bahan berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2007 s/d 2016.

**Tabel 2. 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun 2007 S/D 2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2007	30.000.000,00	36.291.179,00	120,97
2008	33.000.000,00	71.677.792,00	217,21
2009	35.000.000,00	38.384.804,00	109,67
2010	80.000.000,00	89.473.520,00	111,84
2011	85.000.000,00	86.309.000,00	101,54
2012	140.000.000,00	145.200.000,00	103,714
2013	135.000.000,00	136.323.950,00	100,981
2014	135.000.000,00	135.139.000,00	100,333
2015	135.000.000,00	135.650.000,00	100,481



Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2016	135.000.000,00	135.543.000,00	100,402

Sumber: UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan

#### 2.3.4. Kinerja Pelayanan Bidang Pengairan

Tabel Capaian Kinerja Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Bidang Irigasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendaayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	57	57,42	100,73	
	Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya	%	12	8,96	74,68	
	Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	%	41	39,25	95,74%	

Catatan :

1. Indikator kinerja kesatu, Realisasi cukup memuaskan telah malampaui target yang direncanakan yaitu 100,73% dari target 5%, atau 5,42% dari target kinerja dengan demikian tingkat



kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2016 menjadi 57,42% atau luas irigasi sebesar 16.450 Ha.

2. Indikator kinerja kedua, Untuk indikator ini pun realisasi masih dibawah target yang diharapkan yaitu hanya 74,68% dari target 4% atau 0,96% dari target kinerja sehingga capaian kinerja sampai tahun ini menjadi 8,96%, dengan demikian peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi sampai dengan tahun 2016 baru 14 kelompok.
3. Untuk indikator ketiga ini realisasi mencapai 95,74% dari target 5% atau 3,25% dari target kinerja sehingga tingkat kondisi infrastruktur telah mencapai menjadi 39,25%.

### **1. Uraian Program**

Pada tahun 2016 urusan Pekerjaan Umum diwujudkan melalui Kebijakan Peningkatan Infrastruktur, Program yang dilaksanakan oleh Dinas PSDA, yaitu:

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari 64 (enam puluh empat) kegiatan.

### **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

#### **1) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**

Program ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat;
2. Meningkatkan layanan prasarana air baku guna pemenuhan kebutuhan air irigasi.

**Sasaran program adalah sebagai berikut :**

- Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian sumber daya air;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya dalam rangka



- meningkatkan kondisi ketersediaan air yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya;
  - Terwujudnya perlindungan sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
  - Meningkatnya perluasan daerah tangkapan air;
  - Terlindunginya kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir dan abrasi pantai.

**Indikator yang menjadi target kinerja program pada tahun 2016, yaitu :**

- Persentase Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya ditargetkan sebesar 41,00%, sedangkan capaian kinerja sebesar 39,25%.

Untuk program ini dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.950.169.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.929.413.500,00 atau 99,79%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Embung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.677.000,00 realisasi sebesar Rp. 197.937.000,00 atau 99,13%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
  - a. Embung Sorogol 1.00 Bh
2. Rehabilitasi Embung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 422.454.000,00 realisasi sebesar Rp 422.454.000,00 atau 100%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
  - a. Embung Nangela 1.00 Bh
  - b. Embung Ciganda 1.00 Bh
  - c. Embung Pangsor 1.00 Bh
  - d. Embung Pamoyanan/Ciloma 1.00 Bh
  - e. Embung Ciengang 1.00 Bh
  - f. Embung Cipeuteuy 1.00 Bh
3. Penanggulangan Banjir dan Daya Rusak Air, bertujuan meningkatnya sarana dan prasarana pengendali daya rusak air dengan sasaran melaksanakan perbaikan, peningkatan dan pembangunan pada 29 sungai, serta meningkatnya cakupan layanan jaringan dengan pemenuhan kebutuhan air baku irigasi



dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.013.232.000,00 realisasi sebesar Rp 5.008.582.000,00 atau 99,91%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a. Saluran Pasangan           | 41.60 m'   |
| b. Tembok Penahan Tanah (TPT) | 1054.60 m' |
| c. Pasangan Bronjong Kawat    | 165.00 m'  |

4. Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.000.000,00 realisasi sebesar Rp 123.680.000,00 atau 95,14%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a. Data Inventarisasi D.I Kewenangan | 75.00 Eks |
| b. Data Pendukung Infrastruktur SDA  | 16.00 Eks |
| c. Data Koordinat Daerah Irigasi     | 5.00 Eks  |

5. Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 140.000.000,00 realisasi sebesar Rp 137.263.500,00 atau 98,05%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Pengangkatan Gulma                | 2.900 m <sup>3</sup> |
| b. Pembersihan dan Striping/Kosrekan | 2.800 m <sup>3</sup> |

6. Pengelolaan Prasarana Pengambilan (Bendung), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.044.806.000,00 realisasi sebesar Rp 4.039.497.000,00 atau 99,87%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| a. Bendung      | 17,00 Bh |
| b. Bangunan Air | 2,00 Bh  |

## **2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat.

**Sasaran program adalah sebagai berikut :**

- Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan dan cakupan pelayanan irigasi;
- Meningkatnya layanan jaringan irigasi;
- Terwujudnya interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah



- provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan;
  - Meningkatnya kehandalan sistem data dan informasi sumber daya air.

**Indikator yang menjadi target kinerja program pada tahun 2016, yaitu :**

- Persentase Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya ditargetkan sebesar 12,00%, capaian kinerja sebesar 8,96%

Sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 906.403.000 dan realisasi sebesar Rp. 834.061.900 atau 92,00%. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 49.444.300,00 atau 82,41 %.
  2. Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management Program WISMP-2 (LOAN) dengan anggaran sebesar Rp. 561.723.000,00 realisasi sebesar Rp. 525.669.600,00 atau 93,58%. Kegiatan ini tidak dapat terrealisasi secara menyeluruh di karenakan keterbatasan waktu. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
    - a. Pengembangan Irigasi Air Permukaan 6.00 DI
  3. Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management Program WISMP-2 (Pendamping) dengan anggaran sebesar Rp. 284.680.000,00 realisasi sebesar Rp. 258.948.000,00 atau 90,96%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
    - a. Pengembangan Irigasi Air Permukaan 3.00 DI
- Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten ditargetkan sebesar 57,00% capaian kinerja sebesar 57,42%

Sebanyak 61 (enam puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PSDA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.220.063.470,00 dan realisasi sebesar Rp. 70.392.824.900,00



atau 99,00%. Output/ keluaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mencakup 20 Daerah Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.438.452.500,00 realisasi sebesar Rp. 2.030.250.000,00 atau 83,26 %. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- |    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| a. | Penjilidan dan Penggandaan Rutin                          | 50  | bk |
| b. | Laporan Kegiatan Kalibrasi                                | 15  | bk |
| c. | Laporan Kegiatan Penilaian Petugas OP Teladan             | 50  | bk |
| d. | Bahan Materi Penyusunan Draft RTTG                        | 60  | bk |
| e. | Laporan Kegiatan Capaian Kinerja Jaringan Irigasi         | 16  | bk |
| f. | Penjilidan dan Penggandaan Kegiatan Bintel OPJI (Modul)   | 411 | bk |
| g. | Penjilidan dan Penggandaan Kegiatan Bintel OPJI (Panduan) | 411 | bk |
| h. | Laporan Kegiatan Bintel IPJI                              | 5   | bk |
| i. | Penjilidan dan Penggandaan Kegiatan PAI                   | 36  | bk |
| j. | Laporan Kegiatan PAI                                      | 24  | bk |

5. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang mencakup 222 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 35.979.784.700,00 realisasi sebesar Rp. 35.857.278.700,00 atau 99,66%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- |    |                  |          |    |
|----|------------------|----------|----|
| a. | Bendung          | 16,00    | bh |
| b. | Bangunan Air     | 15,00    | bh |
| c. | Saluran Pasangan | 31.093,9 | m' |
| d. | TPT              | 662,50   | m' |

6. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi (DID) mencakup 26 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.898.341.000,00 realisasi sebesar Rp. 6.897.141.000,00 atau 99,98%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- |    |                  |         |    |
|----|------------------|---------|----|
| a. | Bendung          | 6.00    | bh |
| b. | Bangunan Air     | 29.00   | bh |
| c. | Saluran Pasangan | 3140,60 | m' |
| d. | TPT              | 315,70  | m' |



- e. Normalisasi Saluran 1000,00 m'
- f. Bronjong Kawat 53,00 m'
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang mencakup 25 Daerah Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.523.499.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.521.749.000,00 atau 99,95%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bendung 4,00 bh
- b. Bangunan Air 6,00 bh
- c. Saluran Pasangan 1498,80 m'
- d. TPT 138,70 m'
- e. Bronjong Kawat 18,00 m'
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten – Program DAK mencakup 27 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 7.749.855.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.620.761.000,00 atau 98,33%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bendung 2,00 bh
- b. Bangunan Air 39,00 bh
- c. Saluran Pasangan 5894,50 m'
- d. TPT 93,00 m'
- e. Bronjong Kawat 96,00 m'
- e. Pipanisasi 132,00 m'
9. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 397.500.000,00 atau 99,38%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Foto Copy A3 2832,00 lbr
- b. Foto Copy A4 223,000 lbr
- c. Album Gambar 32,00 eks
- d. BOQ 32,00 eks
- e. Estimate Engineering 32,00 eks
- f. Nota Desain 32,00 eks
10. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi – Program PIK kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang mencakup 33 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.998.634.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.997.834.000,00 atau 99,97%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bendung 2,00 bh
- b. Bangunan Air 8,00 bh



- c. Saluran Pasangan 2533,50 m'  
d. TPT 17,50 m'
11. DI. Leuwi Odeng Desa Bojong Lengkong Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 198.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 195.519.300,00 atau 98,65%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 195,20 m'
12. DI. Kedal Meteng Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 183.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 181.404.600,00 atau 98,91%. *Output/Keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 153,00 m'  
b. TPT 20,00 m'
13. DI. Ciater Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 199.800.000,00 realisasi sebesar Rp. 197.950.600,00 atau 99,07%. *Output/Keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 289,50 m'
14. DI. Cicipung Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 173.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 171.739.600,00 atau 98,99%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 259,00 m'
15. DI. Manonjaya Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 166.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 164.652.600,00 atau 99,07%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1.00 bh  
b. Saluran Pasangan 179,00 m'
16. DI. Cigedang Desa Nangerang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 194.300.000,00



- realisasi sebesar Rp. 192.447.600,00 atau 99,05%.  
*Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bendung 1,00 bh
  - b. Saluran Pasangan 4120,00 m'
17. DI. Rancabali Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 272.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 265.845.300,00 atau 97,59%.  
*Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh
  - b. Saluran Pasangan 231,50 m'
18. DI. Rawa Herang Desa Tanjungsari Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 189.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 188.214.600,00 atau 99,11%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 2,00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 96,20 m'
19. DI. Cimapag Desa Bantar Agung Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 450.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 441.867.000,00 atau 98,06%.  
*Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bendung dan Talang Pembawa 1,00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 50,00 m'
  - c. TPT 42,20 m'
20. DI. Tarisi II Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 275.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 268.901.600,00 atau 97,71%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 285,00 m'
21. DI. Babakan Peundeuy Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 198.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 197.155.000,00 atau 99,12%.  
*Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'



22. DI. Ciogong Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 183.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 181.147.000,00 atau 98,77%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 200,00 m'
  - c. TPT 67,50 m'
23. DI. Gunung Sumping Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 169.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 167.381.000,00 atau 98,871%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'
24. DI. Babakansirna Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 195.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 193.519.000,00 atau 98,94%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'
25. DI. Leuwiruntah Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 203.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 202.522.000,00 atau 99,32%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'
26. DI. Cipanengah Desa Cikelat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 168.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 166.887.000,00 atau 98,81%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1,00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 74,00 m'
27. DI. Dusun I Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 177.500.00,000 realisasi sebesar Rp. 175.382.000,00 atau 98,81%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1.00 bh'



28. DI. Curug Pilung Desa Giriharja Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 193.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 192.673.000,00 atau 99,37%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1.00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 149,80 m'
29. DI. Cipeuti Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 187.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 185.039.000,00 atau 98,95%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 75,00 m'
30. DI. Cianteri Desa Caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 195.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 195.532.000,00 atau 98,89%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 293,60 m'
31. DI. Cisulam Cihaneuleum Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 172.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 170.367.000,00 atau 98,88%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 186,60 m'
32. DI. Cihaspiah Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 184.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 182.535.000,00 atau 98,93%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 326,40 m'
33. DI. Cikunten Bojong Menteng Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 167.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 165.782.000,00 atau 98,92%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 298,00 m'



34. DI. Cibeungang Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 174.800.000,00 realisasi sebesar Rp. 172.892.000,00 atau 98,91%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 258,70 m'
35. DI. Giri Mukti Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 181.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 179.636.000,00 atau 98,97%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1.00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 26,00 m'
36. DI. Pasir Rangkong Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 175.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 173.934.000,00 atau 98,88%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 261,70 m'
37. DI. Cibuluh II Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 188.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 186.060.000,00 atau 98,65%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 307,50 m'
38. DI. Ciguha Desa Cijambe Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 179.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 177.467.000,00 atau 98,92%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 268,50 m'
39. DI. Babakan Sawah Desa Ciambarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 181.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 179.276.000,00 atau 98,94%. *Output/keluaran* kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 251,70 m'
40. DI. Ciherang Desa Gunung Malang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu



Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 186.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 184.330.000,00 atau 98,84%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 217,30 m'
- b. TPT 18,00 m'

41. DI. Cisarua Babakan Desa Ciambar Jaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 168.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 167.391.000,00 atau 99,22%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 233,80 m'

42. DI. Ciporeang Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 169.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 167.529.000,00 atau 98,78%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 275,40 m'

43. DI. Munjul III Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 187.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 185.657.000,00 atau 98,81%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 93,40 m'
- b. TPT 25,00 m'

44. DI. Tangkolo Desa Sampora Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 194.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 191.900.000,00 atau 98,82%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 107,80 m'
- b. TPT 35,00 m'

45. DI. Nyangkowek Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 355.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 345.329.000,00 atau 97,28%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :

- a. Saluran Pasangan 115,60 m'
- b. TPT 14,00 m'



46. DI. Cisaranten Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 198.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 195.872.000,00 atau 98,83%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 276,50 m'
47. DI. Cimahpar Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 185.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 183.358.000,00 atau 98,95%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Bangunan Air 1.00 bh'
  - b. Saluran Pasangan 151,50 m'
48. DI. Alor Lebaksiuh Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 195.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 192.975.000,00 atau 98,86%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. TPT 31,80 m'
49. DI. Cikaramat Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 182.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 180.479.000,00 atau 98,95%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 273,30 m'
50. DI. Cigadang Desa Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 192.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 190.554.000,00 atau 98,89%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 47,00 m'
51. Irigasi Sungai Ciwalahar Blok Cidadap Desa Cidadap Kec. Cidadap Kab. Sukabumi Jl. Cidadap No. 80 Sukabumi 43183 (Banprop 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 24.500.000,00 tidak ada penyerapan anggaran. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 39,70 m'
52. Pembangunan dan Peningkatan DI. Cibarengkok Desa Cijulang Kecamatan Jampang Tengah (Banprop 2016)



- mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 168.156.000,00 atau 98,92%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 193,50 m'
53. Pembangunan dan Peningkatan DI. Cibalimbing Desa Bojong Galing Kecamatan Bojong Genteng (Banprop 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 158.258.000,00 atau 98,91%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 240,80 m'
54. Pembangunan dan Peningkatan DI. Cipicung Ciluk Desa Tanjungsari Kecamatan Jampang Tengah (Banprop 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 158.231.000,00 atau 98,89%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 240,30 m'
55. Pembangunan dan Peningkatan DI. Cileungsir II Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah (Banprop 2016) mencakup satu Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 158.225.000,00 atau 98,89%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. TPT 52,00 m'
56. Peningkatan Jaringan Irigasi (DBH Pajak Rokok 2016) 10 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 988.554.000,00 atau 98,86%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 761,10 m'
  - b. TPT 18,00 m'
57. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (SILPA DAK Tahun 2015) mencakup 5 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 873.100.270,00 realisasi sebesar Rp. 863.539.500,00 atau 98,90%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 555,60 m'
  - b. TPT 131,40 m'
58. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Desa Cisaat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.124.000,00 atau 98,83%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :



- a. Saluran Pasangan 65,20 m'
59. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Cimunding Desa Cijulang Kec. Jampang Tengah (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.189.000,00 atau 98,92%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 131,70 m'
60. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Cibantar 1 Desa Padasenang Kec. Cidadap (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.148.000,00 atau 98,86%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 55,30 m'
61. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Cipamatutan Tonjong Desa Parakansalak (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.130.000,00 atau 98,84%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 77,50 m'
62. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Cijamban Desa Sukamulya Kec. Caringin (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.122.000,00 atau 98,83%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 110,80 m'
63. Peningkatan & Pembangunan Jaringan Irigrasi Citugu Desa Cijengkol Kec. Caringin (Bantuan Provinsi 2016) mencakup 1 Daerah Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 81.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 80.802.000,00 atau 98,90%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Saluran Pasangan 104,20 m'
64. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK P2D2 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 228.097.000,00 realisasi sebesar Rp. 226.729.900,00 atau 99,40%. *Output*/keluaran kegiatan ini adalah :
- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor 1,00 Unit  
Angkutan Barang



- b. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2,00 Unit  
Beroda Dua

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan

1. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air baku yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana saluran irigasi dan penampung air baku yang memadai. Selain itu, tingginya curah hujan menyebabkan sarana dan prasarana penampung air menjadi rusak akibat longsor dan erosi ;
2. Perubahan kondisi lapangan akibat curah hujan yang tinggi berdampak pada eksisting data detail perencanaan teknis yang dibuat n-1;
3. Peran serta pengawas lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan kurang mendapat perhatian serius dari Pihak Penyedia Jasa;
4. Kurang maksimalnya Kordinasi pengawas lapangan dengan PPTK menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan administrasi;
5. Lemahnya pengawasan pekerjaan oleh baik oleh Pengawas Lapangan maupun Penyedia Jasa mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan bergantung pada para pekerja lapangan sehingga kurang memperhatikan kerapihan;
6. Sosialisasi dengan masyarakat sebelum pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal sehingga terjadi perubahan pekerjaan dan gambar rencana;
7. Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A kurang optimal dalam melaksanakan kontrol / pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

#### 2) Solusi

1. Alokasi anggaran untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lebih ditingkatkan lagi;
2. Pelaksanaan kontrak dengan menggunakan jenis kontrak harga satuan (*unit price*) sehingga memudahkan pelaksanaan pekerjaan karena volume dan harga satuan dapat berubah sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan lapangan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 0% sebagai dasar perubahan kontrak yang selanjutnya dilaksanakan Kontrak Addendum;
3. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengawasan pekerjaan dengan meningkatkan pelaksanaan bimtek;
4. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat petani melalui kelompok P3A/GP3A melalui pemberdayaan kelembagaan sehingga



partisipasi kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan irigasi lebih baik lagi;

5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Kinerja pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku irigasi untuk kebutuhan pertanian, antara lain :

1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
2. Melaksanakan pengendalian daya rusak air;
3. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaa jaringan irigasi ;
4. Melaksanakan pengembangan kelembagaan petani pemakai air (P3A & GP3A) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air khususnya jaringan irigasi.
5. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kehandalan data dan informasi sumber daya air.

Capaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi selama periode RPJMD tahun 2010 – 2015 dengan melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum dengan 2 (dua) program wajib dan 15 sasaran kegiatan, yaitu :

1. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan realisasi kegiatan :
  - a. Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA);
  - b. Penanggulangan Banjir dan Daya Rusak Air;
  - c. Pembangunan Embung;
  - d. Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten.
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan realisasi kegiatan :
  - a. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
  - b. Pembinaan GP3A/P3A Mitra Cai;
  - c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - d. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten;
  - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten;
  - f. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif – Program WISMP;
  - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pedesaan;
  - h. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan; dan
  - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



Dari jumlah program kegiatan tersebut untuk alokasi anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 253.615.873.934,00 dengan realisasi keuangan sebesar 98% yaitu Rp. 252.094.178.690,00 sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk tahun anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran Rp. 73.599.902.583,00 dengan realisasi sampai dengan bulan maret sebesar 0,23% atau Rp. 168.484.100,00 dan capaian kinerja fisik masih 0%, hal ini dikarenakan baru mulai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### **2.3.5. Kinerja Pelayanan Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan**

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan (Distarkimsh) menjalankan 3 (tiga) program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 2) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase;
- 3) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman.

#### **1) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

##### **Isu Strategis**

- Target MDGs (*Millenium Development Goals*) sampai dengan tahun 2015, pengurangan ½ penduduk yang belum terakses air minum;
- Adanya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 yang mensyaratkan perubahan pelayanan dari air bersih ke air minum;
- Tingginya tingkat pencemaran air permukaan (sungai dan air tanah);
- Sulitnya mendapatkan air baku disertai penurunan air tanah yang terus bertambah.

##### **Latar Belakang**

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama dalam mengurangi perilaku buang air besar sembarangan;
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum di perkotaan (hanya 34%) dan perdesaan (hanya 45%);
- Belum adanya pelayanan air limbah baik diperkotaan maupun perdesaan;



- Masih rendahnya penerapan sistem sanitasi secara terpusat (sistem *sewerage*).

### **Tujuan**

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah, dengan sasaran :

- Terwujudnya pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum di perkotaan;
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah perdesaan yang rawan air minum dan/atau wilayah tertinggal
- Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di perkotaan khususnya di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak, Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten) melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah komunal dan/atau pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- Terwujudnya pemenuhan prasarana jamban ber-*septic tank* secara bertahap untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- Terwujudnya pengembangan jamban komunal (WC umum) pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik.

### **Rasional**

- Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan air limbah;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan air limbah;
- Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat;
- Pembangunan sarana dan prasarana air limbah bagi kawasan permukiman kumuh dan nelayan;
- Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas;
- Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air limbah terpusat di kawasan perkotaan.

Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut ini :



**Tabel II. 8 Pencapaian Program Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Cakupan layanan air minum perdesaan	%	46	44,18%	96,04
	cakupan pelayanan air minum perkotaan	%	9,62	10,77	111,95
	cakupan pelayanan air limbah domestik	%	36,5	37,35%	102,33

**Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut:**

1. Pada Tahun 2016, dari jumlah total 702.597 KK di Kabupaten Sukabumi, baru 310.407 KK yang mendapatkan akses air minum di wilayah perdesaan, atau sekitar 44,18% atau baru mencapai 96,04%.
2. Pada Tahun 2016, cakupan pelayanan air minum perkotaan mencapai 10,77% atau sudah melebihi target yaitu 111,95%.
3. Dari hasil survey, terdapat 262.428 KK yang terlayani tangki septik/MCK komunal/SPAL pada akhir tahun 2016 dari total jumlah rumah tangga 702.597, atau sekitar 37,35% atau tercapai 102,33%.

Program ini terdiri dari 147 (seratus empat puluh tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.042.306.959,00 terealisasi sebesar Rp 45.241.831.550,00 atau 96,17%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dengan anggaran sebesar Rp. 11.584.408.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.413.850.000,00 atau 98,53%. Keluaran kegiatan ini adalah sarana air bersih 118 unit;
2. Sinergitas Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SANIMAS dan PAMSIMAS) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 136.560.000,00 atau 91,04%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan Sanimas dan Pamsimas selama satu tahun;



3. Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK) dengan anggaran sebesar Rp. 15.719.040.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.620.569.500,00 atau 99,37%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 396 unit
4. Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK) (DAK dan Pendampingan) dengan anggaran sebesar Rp. 2.223.169.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.223.167.000,00 atau 99,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK Komunal dan IPAL Kombinasi 8 unit;
5. Penyediaan Sistem Pelayanan Air Bersih (DAK dan Pendampingan DAK Non DR) dengan anggaran sebesar Rp. 2.519.028.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.317.470.000,00 atau 92%. Keluaran kegiatan ini adalah SPAM desa rawan air minum 7 paket;
6. Review Memorandum Pembangunan Sanitasi dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 298.971.950,00 atau 99,66%. Keluaran kegiatan ini adalah Review Memorandum Pembangunan Sanitasi 1 dokumen;
7. DED SPAM Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 406.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 393.477.500,00 atau 96,73%. Keluaran kegiatan ini adalah DED SPAM Perdesaan 1 dokumen;
8. Penyediaan Sanitasi Masyarakat MCK (DAK dan Pendampingan) (SiLPA) dengan anggaran sebesar Rp. 893.101.816,00 terealisasi sebesar Rp. 893.101.000,00 atau 99,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK Komunal dan IPAL Kombinasi 2 unit;
9. Penyediaan Sistem Pelayanan Air Bersih (DAK dan Pendamping DAK Non DR) (SiLPA) dengan anggaran sebesar Rp. 593.339.727,00 terealisasi sebesar Rp. 571.573.000,00 atau 96,33%. Keluaran kegiatan ini adalah SPAM desa rawan air minum 1 paket;
10. Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK) (Luncuran 2015) dengan anggaran sebesar Rp. 30.285.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.285.000,00 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
11. Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) dengan anggaran sebesar Rp. 61.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.900.000,00 atau 52,25%. Keluaran kegiatan ini adalah Sarana sanitasi tipe pre ODF 3 unit
12. Pembangunan MCK Kp. Cicadas RT.02/RW.04 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabundungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi



- sebesar Rp. 49.340.000,00 atau 98,68%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
13. Pembangunan MCK Desa Cibuntu Rw 06 – 12 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  14. Pembangunan MCK Kp. Cikadu RT.03/RW.05 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  15. Pembangunan MCK Desa Cidadap Rw 01-05 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.970.000,00 atau 98,97%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  16. Pembangunan MCK Desa Bojongkerta Rw 6-10 Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.040.000,00 atau 99,04%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  17. Pembangunan MCK Kp. Pameungpeuk RT.07/RW.01 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.460.000,00 atau 98,92%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  18. Pembangunan MCK Kp.Tangkil RT.04/RW.05 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  19. Pembangunan MCK Kp.Cirangkong RT.18/RW.07 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  20. Pembangunan MCK Kp.Cisarua RT.07/RW.03 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00



- teralisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
21. Pembangunan MCK Kp.Gunung Endut RT.06/RW.02 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  22. Pembangunan MCK Desa Buniwangi Rw 00 – 025 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  23. Pembangunan MCK Desa Cimanggu Rw 001 – 002 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  24. Pembangunan MCK Desa Cimanggu Rw 003 – 004 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  25. Pembangunan MCK Kelurahan Rw 001 - 015 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 98.940.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  26. Pembangunan MCK Desa Citepus Rw 001 - 011 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  27. Pembangunan MCK Kelurahan Rw 016 – 035 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  28. Pembangunan MCK Desa Citepus Rw 012 – 22 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016)



- dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000,00 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
29. Pembangunan MCK Kp. Cibelendok RT.05/RW.01 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  30. Pembangunan MCK Desa Jayanti Rw 001 - 008 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  31. Pembangunan MCK Kp. Sampalan RT.24/RW.03 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  32. Pembangunan MCK Desa Jayanti Rw 009 - 018 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  33. Pembangunan MCK Desa Citarik Rw 001 - 009 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  34. Pembangunan MCK Kp. Cibelendok RT.04/RW.01 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.440.000,00 atau 98,88%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
  35. Pembangunan MCK Desa Cikadu Rw 001 – 003 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000,00 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.



36. Pembangunan MCK Desa Citarik Rw 10 – 17 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
37. Pembangunan MCK Desa Cikadu Rw 004 - 006 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000,00 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
38. Pembangunan MCK Desa Loji Rw 001 - 007 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.960.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
39. Pembangunan MCK Desa Tonjong Rw 001 - 005 Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000,00 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
40. Pembangunan MCK Desa Loji Rw 006 – 015 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.960.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
41. Pembangunan MCK Desa Cihaur Rw 001 - 005 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
42. Pembangunan MCK Kp. Cigoong RT.14/RW.05 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
43. Pembangunan MCK Kp. Cikaung RT. 01/RW.04 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.



44. Pembangunan MCK Desa Cihaur Rw 006 - 11 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.940.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
45. Pembangunan MCK Desa mekarasih Rw 007 - 10 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.960.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
46. Pembangunan MCK Desa Mekarasih Rw 001 - 006 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.970.000,00 atau 98,97%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
47. Pembangunan MCK Desa Kertajaya Rw 001 - 005 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
48. Pembangunan MCK Desa Kertajaya Rw 006 - 010 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
49. Pembangunan MCK Kp. Cileuleuy RT.03/RW.04 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
50. Pembangunan MCK Desa Mekarasih Rw 001 - 006 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.970.000,00 atau 98,97%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit.
51. Pembangunan MCK Kp. Parigi RT.02/RW.01 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi



- sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
52. Pembangunan MCK Kp. Ciburial RT.21/RW.07 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  53. Pembangunan MCK Desa mekarasih Rw 007 - 010 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  54. Pembangunan MCK Kp. Cikadu Tonggoh RT.04/RW.05 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  55. Pembangunan MCK Desa Cibuntu Rw 01 - 05 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  56. Pembangunan MCK Kp. Kaladi I RT.03/RW.05 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  57. Pembangunan MCK Desa Cidadap Rw 06 – 11 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.960.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  58. Pembangunan MCK Kp. Tangkolo RT.07/RW.01 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.440.000,00 atau 98,88%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  59. Pembangunan MCK Kp. Babakan Sirna RT.13 /RW.04 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi



- (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.530.000,00 atau 99,06%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
60. Pembangunan MCK Kp. Kaladi I RT.01/RW.05 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.460.000,00 atau 98,92%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
61. Pembangunan MCK Kp. Pasirwalang RT.06/RW.03 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
62. Pembangunan MCK Kp. Nempel RT.09/RW.04 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
63. Pembangunan MCK Desa Sanggrawayang Rw 01 - 05 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.990.000,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
64. Pembangunan MCK Kp. Cimuncang RT.28/RW.10 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
65. Pembangunan MCK Kp.Tenjo Laut RT.04/RW.02 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,- atau 99,00%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
66. Pembangunan MCK Desa Sanggarawayang Rw 06 - 11 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.040.000,00 atau 99,04%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit



67. Pembangunan MCK Desa Bojongkerta Rw 01-5 Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.640.000,00 atau 99,64%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
68. Pembangunan MCK Desa Ubrug Rw 1-6 Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000,00 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
69. Pembangunan MCK Kp. Kaladi II RT.01/RW.06 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.480.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
70. Pembangunan MCK Kp. Pasir Haur Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
71. Pembangunan MCK Kp. Cingenca RT.22/RW.08 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
72. Pembangunan MCK Kp. Cibuluh RT.26/RW.10 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
73. Pembangunan MCK Kp. Cirahong RT.12/RW.04 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.540.000,00 atau 99,08%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
74. Pembangunan MCK Kp. Pakuwon RT.09/RW.02 Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.460.000,00 atau 98,92%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit



75. Pembangunan MCK Kp. Sindangsari RT.02/RW.02 Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
76. Pembangunan MCK Kp. Bojong Menteng RT.25/RW.06 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.640.000,00 atau 99,28%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
77. Pembangunan MCK Kp. Ciwangun RT.17/RW.05 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.520.000,00 atau 99,04%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
78. Pembangunan MCK Kp. Ciaul RT.07/RW.02 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.440.000,00 atau 98,88%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
79. Pembangunan MCK Kp. Ciaul RT.28/RW.09 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
80. Pembangunan MCK Kp. Ranji RT.05/RW.02 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
81. Pembangunan MCK Kp. Tangkil RT.01/RW.05 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
82. Pembangunan MCK Kp. Tangkil RT.03/RW.05 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi



- sebesar Rp. 49.480.000 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
83. Pembangunan MCK Kp.Tangkil RT.02/RW.05 Desa Lebacksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  84. Pembangunan MCK Kp. Kalapanunggal RT.17 /RW.03 Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  85. Pembangunan MCK Kp. Cikubang RT.21/RW.09 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.470.000,00 atau 98,94%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  86. Pembangunan MCK Kp. Ciawitali RT.11/RW.05 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.440.000,00 atau 98,88%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  87. Pembangunan MCK Kp. Sinagar Lapang RT.07/RW.03 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  88. Pembangunan MCK Kp. Tangkil RT.02/RW.01 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.510.000,00 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  89. Pembangunan MCK Kp. Tangkil RT.34/RW.02 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,00 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  90. Pembangunan Sarana Air Bersih Rt 001 - 003 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Bantuan



- Provinsi 2016) Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 197.920.000,00 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah Sarana air bersih 1 paket
91. Sumur Bor dan PIPANISASI Kp. Cijulang Rt.29/RW.06 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.540.000,00 atau 99,03%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor 1 paket
  92. Sumur Bor dan PIPANISASI Kp. Pasir Angin RT.13/RW.02 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.440.000 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket
  93. Sumur Bor dan PIPANISASI Kp. Pasir Angin RT. 15/RW.03 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.490.000 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah Sumur bor dan pipanisasi 1 paket
  94. Sumur Bor dan PIPANISASI Kp. Cibelendok RT.06/RW.01 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.500.000 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket
  95. Sumur Bor Kp. Palasari Hilir RT.14/RW.02 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.000.000 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah Sumur bor 1 paket
  96. PIPANISASI Kp. Cikaung RT.02/RW.04 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah pipanisasi 1 paket
  97. Sumur Bor Kp. Cikadu RT.01/RW.05 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.020.000 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah Sumur bor 1 paket



98. Sumur Bor dan Pisanisasi Kp. Cingenca RT.22/RW.08 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.520.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah Sumur bor dan pisanisasi 1 paket;
99. Sumur Bor dan Pisanisasi Kp. Pasir Angin RT.24/RW.03 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkudadengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.440.000 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pisanisasi 1 paket
100. Sumur Bor dan Pisanisasi Kp.Lebakwangi RT.11/RW.02Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp. 148.500.000 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pisanisasi 1 paket;
101. Sumur Bor Kp.Tangkil RT.03/RW.05 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.010.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor 1 paket;
102. Sumur Bor Kp. Pajagan RT.27/RW. 11 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.000.000 atau 99%. Keluaran kegiatan ini adalah Sumur bor 1 paket;
103. Sumur Bor dan Pisanisasi Kp.Tangkolo RT.32/RW.12 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.600.000 atau 99,07%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pisanisasi 1 paket;
104. Sumur Bor dan Pisanisasi Kp. Cisarua RT.07/RW.03 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.540.000 atau 99,03%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pisanisasi 1 paket;
105. Sumur Bor Kp. Tangkil RT.02/RW.05 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.040.000 atau 99,04%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor 1 paket;



106. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Sinagar Lapang RT.07/RW.03 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.520.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
107. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Cikubang RT.21/RW.09 Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.520.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
108. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Pamungguan RT.13/RW.04 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 198.010.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
109. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Cipanengah RT.02/RW.03 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.530.000 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
110. Pipanisasi Kp. Babakan RT.17/RW.06 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Keluaran kegiatan ini adalah pipanisasi 1 paket;
111. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Bojonggenteng RT.01/RW.01 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.520.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
112. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Bojonggenteng RT02/RW.01 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.540.000 atau 99,03%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
113. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Bojonggenteng RT.08/RW.03 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp.



- 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.500.000 atau 99,00%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
114. Sumur Bor Kp. Parigi RT.14/RW.04 Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.030.000 atau 99,03%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor 1 paket;
115. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Cisarua RT.06/RW.01 Desa Bojong Asih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.510.000 atau 99,01%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
116. Pipanisasi Kp. Cibodas RT.01/RW.01 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.020.000 atau 99,02%. Keluaran kegiatan ini adalah pipanisasi 1 paket;
117. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Cijulang RT 25/RW 05 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.490.000 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
118. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Ranji RT 19/RW 04 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.440.000 atau 98,96%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
119. Sumur Bor dan Pipanisasi Kp. Parabon RT.33/RW.06 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.470.000 atau 98,98%. Keluaran kegiatan ini adalah sumur bor dan pipanisasi 1 paket;
120. Infrastruktur Air Minum (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015) dengan anggaran sebesar Rp. 694.805.453,00 terealisasi sebesar Rp. 12.742.600 atau 1,83%. Keluaran kegiatan ini adalah SPAM desa rawan air minum 2 paket
121. Infrastruktur Air Minum (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan anggaran sebesar Rp. 215.895.963,00 terealisasi sebesar



- Rp. 6.044.000 atau 2,80%. Keluaran kegiatan ini adalah SPAM desa rawan air minum 1 paket;
122. Pembangunan Mck, Rt.007/Rw.002, Desa Cihanyar, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.650.000 atau 95,30%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  123. Pembangunan Mck, Rt.015/Rw.004, Desa Cihanyawar, Kec. Nagrak Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.600.000 atau 95,20%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  124. Pembangunan Mck, Rt.020/Rw.0005, Desa Cihanyawar, Kec. Nagrak Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.640.000 atau 95,28%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  125. Pembangunan Mck, Rt.021/Rw.005, Desa Cihanyawar, Kec. Nagrak Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.640.000 atau 95,28%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  126. Pembangunan Mck, Kp.Cimanggu Rt.36/Rw.09, Desa Padaasih, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.840.000 atau 95,68%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  127. Pembangunan Mck, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.800.000 atau 95,60%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
  128. Pembangunan Mck, Desa Mekarjaya, Kec. Caringin Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.740.000 atau 95,48%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  129. Pembangunan Mck, Desa Talaga, Rt.003/Rw.001, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.700.000 atau 95,40%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
  130. Pembangunan Mck, Kampung Kebon Genep, Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.840.000 atau 95,68%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;



131. Pembangunan Mck, Kampung Gunung Leutik, Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.800.000 atau 95,60%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
132. Pembangunan Mck, Kp.Sirnagalih Rt.27/09, Desa Sukajaya, Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.800.000 atau 95,60%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit
133. Pembangunan Mck, Kp.Jati Rt.05/04, Desa Mekarsari, Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.650.000 atau 95,30%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
134. Pembangunan Mck, Kp.Cirende Rt.03/03, Desa Mekarsari, Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.600.000 atau 95.20%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
135. Pembangunan Mck, Kp.Cikareo Rt.03/05, Desa Sukadamai, Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.740.000 atau 95,48%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
136. Pembangunan Mck, Kp.Sarongge Rt.01/01, Desa Sukadamai, Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.770.000 atau 95,54 %. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
137. Pembangunan Mck, Kp.Salagombing Girang, Rt.04/03, Desa Sukadamai, Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.760.000 atau 95,52%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
138. Pembangunan Mck Kp. Pamoyanan Peuntas, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.840.000 atau 95,68%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
139. Pembangunan Mck Kp. Pamoyanan, Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.750.000 atau 95,50%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
140. Pembangunan Mck Kp. Gandasoli (Babakan Jaman), Desa Cipurut, Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan



- anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.800.000 atau 95,60%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
141. Pembangunan Mck Kp. Cimuncang Batas (Masjid Madinatul Ulum), Desa Pasirhalang, Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.850.000 atau 95,70%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 1 unit;
142. Pembangunan Sarana Air Bersih, Rw.003, Desa Caringin Wetan, Kec. Caringin Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.250.000 atau 95,63%. Keluaran kegiatan ini adalah sarana air bersih 1 paket;
143. Pembangunan Sarana Air Bersih, Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.330.000 atau 95,67%. Keluaran kegiatan ini adalah sarana air bersih 1 paket;
144. Pembangunan Sarana Air Bersih, Kp.Cilodor Rt.01/Rw.07, Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.200.000 atau 95,60%. Keluaran kegiatan ini adalah sarana air bersih 1 paket;
145. Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK) (DBH Pajak Rokok 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 56.460.000 atau 94,10%. Keluaran kegiatan ini adalah MCK 2 unit.
146. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Infrastruktur Air Minum (P2D2 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 183.771.000,00 terealisasi sebesar Rp. 158.000.000 atau 85,98%. Keluaran kegiatan ini adalah Sepeda motor 5 unit.
147. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Infrastruktur Sanitasi (P2D2 2016) dengan anggaran sebesar Rp. 107.613.000,00 terealisasi sebesar Rp. 94.800.000 atau 94,10%. Keluaran kegiatan ini adalah Sepeda motor 3 unit.

### **Permasalahan**

- Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan belum seimbang dengan tingkat perkembangan penduduk;



- Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas dan harus membayar lebih mahal;
- Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat belum memadai;
- Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan;
- Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas;
- Kualitas sumber air baku semakin menurun;
- Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
- Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan pemerintah;
- Potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh Pemerintah;
- Fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang mencukupi kebutuhannya sendiri.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dan belum diberdayakannya potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah serta terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman berbasis masyarakat;
- Peraturan perundang-undangan meliputi lemahnya penegakan hukum dan belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta belum lengkapnya NSPM dan SPM pelayanan air limbah.
- Kelembagaan meliputi kapasitas SDM yang masih rendah, kurang koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah, belum terpisahnya fungsi regulator dan operator, serta lemahnya fungsi lembaga bidang air limbah.
- Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah dan rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah yang merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah.

### **Solusi**

- Penyusunan basis data cakupan dan akses air minum masyarakat yang akurat;



- Penyusunan Feasibilities Study (FS) dan DED sebagai turunan dari Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) yang telah disusun;
- Mengalokasikan anggaran SPAM berdasarkan rencana induk yang telah disusun;
- Intensifikasi sosialisasi/desiminasi/kampanye pengelolaan SPAM kepada masyarakat;
- Peningkatan Akses Aman Air Minum melalui penyelenggaraan pengembangan SPAM yang sesuai dengan kaidah teknis dan inovasi teknologi; dan
- Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat.
- Penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman berbasis masyarakat;
- Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan;
- Meningkatkan akses MCK komunal, memberikan dana stimulan dan kampanye pentingnya kualitas lingkungan;
- Membangun IPAL dan IPLT skala kota;
- Peraturan perundang-undangan meliputi lemahnya penegakan hukum dan belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta belum lengkapnya NSPM dan SPM pelayanan air limbah.
- Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah;
- mengalokasikan pendanaan dari pemerintah untuk penanganan pengelolaan air limbah.

## **2) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase**

### Isu Strategis

- Seringnya terjadi banjir di daerah permukiman yang diakibatkan prasarana drainase tidak berfungsi;
- Tidak tersedianya dana yang memadai untuk operasional dan pemeliharaan;
- Sulitnya mendapatkan lahan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS);
- Belum terselenggaranya program pengurangan sampah di sumbernya ;



- Pengelolaan sampah melalui penerapan 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycling*).

#### Latar Belakang

- Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurunnya fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan dan durasi tergenang diakibatkan oleh kelangkaan lokasi pembuangan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke saluran drainase juga menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Peningkatan debit limpasan hujan juga disebabkan oleh semakin berkurangnya bidang resapan dan adanya perubahan iklim akibat efek pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek;
- Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase. Ketidakjelasan pengelola menyebabkan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran drainase. Hal itu mengakibatkan pengabaian atas kondisi saluran drainase sehingga berfungsi kurang optimal;
- Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier;
- Keterbatasan pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun pemeliharaan sistem drainase menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan lemahnya operasi dan pemeliharaan sistem.
- Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan;
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah;



- Kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, baik secara teknis maupun nonteknis;
- Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPPAS/TPS;
- Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPPAS;
- Cakupan pelayanan sampah yang terangkut sebesar 46,31%.

#### Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan persampahan dan mengurangi genangan di perkotaan yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan persoalan persampahan dan drainase.

#### Sasaran program

- Tercapainya pengurangan volume sampah dari sumber;
- Bertambahnya cakupan pelayanan;
- Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan;
- Tercapainya peningkatan pengelolaan TPPAS menjadi *Sanitary Landfill*;
- Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan;
- Terwujudnya pengembangan TPPAS baru sekaligus sebagai TPPAS Regional untuk mengantisipasi timbulnya sampah perkotaan akibat pesatnya pertumbuhan permukiman;
- Berkurangnya daerah genangan khususnya di perkotaan, melalui pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada setiap kawasan fungsional, seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer, tanpa membebani saluran di permukiman dan/atau saluran tepi jalan;
- Terwujudnya optimalisasi dan keterpaduan fungsi saluran primer, sekunder dan tersier, serta mengembangkan lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir;
- Terwujudnya koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup.

#### Rasional



- Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
- Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelola;
- Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan;
- Mengembangkan kelembagaan dan peraturan;
- Meningkatkan jumlah sarana pengelolaan sampah;
- Kampanye/sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- Meningkatkan cakupan pelayanan drainase melalui optimalisasi sistem yang ada;
- Memperbaiki sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan;
- Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui penegasan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengelola drainase serta penerapan manajemen aset dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Menyusun rencana induk sistem pengelolaan drainase serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 9 Pencapaian Program Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%		2	
	Persentase pengangkutan sampah	%			
	Persentase pengoperasian TPA	%			
	Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	5,45	3,45	63,30
	Pengurangan Luas Genangan	%	42,5	47,50	111,76



**Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut:**

1. Jumlah penduduk perkotaan yang terlayani jaringan drainase berdasar hasil survey adalah 8.069 KK atau 27.273 jiwa. Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk di wilayah perkotaan (Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja, Jampang Tengah, Jampang Kulon, Palabuhanratu, Surade, dan Sagaranten) adalah 790.095 jiwa.  
 $27.273 \text{ jiwa} / 790.095 \text{ jiwa} \times 100\% = 3,45\%$

Maka tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota baru mencapai 3,45% atau terealisasi sebesar 63,30%.

2. Luasan yang masih tergenang di suatu Kabupaten Sukabumi pada akhir tahun 2016 adalah 28,5ha. Sedangkan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kabupaten Sukabumi adalah 60 ha. Maka Daerah Rawan Genangan adalah  $28,5ha / 60ha \times 100\% = 47,5\%$ , atau terealisasi 111,76% melebihi target.

Program ini terdiri dari 14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp terealisasi sebesar Rp 00 atau 51,86%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masterplan Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 784.915.000 atau 98,11%. Keluaran kegiatan ini adalah Masterplan drainase 1 dokumen;
2. Penataan Drainase Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.723.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.678.550.000,00 atau 98,36%. Keluaran kegiatan ini adalah drainase 31 paket;
3. .

**Permasalahan**

- Belum tersedianya basis data kondisi eksisting drainase di Kabupaten Sukabumi;
- Belum tersedianya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Drainase, sehingga pengembang tidak punya acuan untuk sistem lokal yang berakibat pengelolaan sifatnya hanya partial di wilayah yang dikembangkannya saja;
- Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini;



### **Solusi**

- Penyusunan basis data kondisi eksisting drainase di Kabupaten Sukabumi;
- Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Drainase;
- Bekerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk Public-Private Partnership dalam pembangunan drainase kawasan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai;

Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan lingkungan; jasa konstruksi dan pengendalian bangunan; penyehatan lingkungan; pengkajian bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang penataan bangunan lingkungan; jasa konstruksi dan pengendalian bangunan; penyehatan lingkungan; pengkoordinasian penyelenggaraan bangunan gedung di daerah; pengkajian bahan penerbitan izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan izin usaha jasa konstruksi bangunan; pengkoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya; pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; pengkoordinasian penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman; pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

#### **2.3.6. Kinerja Pelayanan UPTD**

UPTD bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah memelihara jaringan jalan, jaringan irigasi dan bangunan penyehatan lingkungan serta memfasilitasi dinas lain, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat pada umumnya dalam kaitan tugas ke-PU-an di wilayahnya, serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan fisik dinas. Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, secara umum belum optimal. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan kurang didukung dengan peralatan dan pendanaan yang memadai.

## **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM**



Sebagai upaya mendorong DINAS PEKERJAAN UMUM menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan *stake holder* lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

## 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKP

Review terhadap rancangan awal RKP dapat dilihat pada tabel II.5 Perbandingan rencana RKP dengan hasil analisa kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum di bawah ini.

**Tabel II.5. Perbandingan Rancangan RKP dengan Hasil Analisis Kebutuhan DINAS PEKERJAAN UMUM TA 2017 dan TA 2018**

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-			
			2017		2018	
			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	769	100	1.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	2.372	100	2.500



No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-			
			2017		2018	
			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	5	6	7	8
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	100	94	100	100
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100	118	100	200
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100	444	100	500
2	meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	program jalan dan jembatan	46,85	145.750	46,85	160.000
		Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	98,55	500	98,55	1.000
		Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Sukaraja - Sukalarang)	1 dok amdal	400	1 dok amdal	650
		pengadaan sarana pengelolaan jalan	6	7.170	6	13.000
		Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)	1 dok amdal	400	1 dok amdal	500
		Pembangunan jalan lintas (Palabuhanratu - Cisolok)	1 dok amdal	400	1 dok amdal	500
		Pembangunan jalan (Cibutun - Balewer)	1 dok DED	1.000	1 dok DED	1.000
		Pembangunan jalan (Situhiang - Marelang)	1 dok amdal	300	1 dok amdal	300
		<b>program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	5	500	5	500
		3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>	62	30.600
	18			750	18	750
	47			23.500	47	23.500
Kegiatan Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA)	32 DI			133	32 DI	133
Kegiatan Pengendalian dan Daya Rusak Air	40			3.657	40	3.657



No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-			
			2017		2018	
			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	5	6	7	8
		Kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Bendung	21	6.802	21	8.802
			2	512	2	512
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	8	2.633	8	2.633
		Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten		140		350
			7		7	
			7		7	
			7		7	
		<i>Perencanaan Teknis Sumber Daya Air</i>		713		900
			245		245	
			245		245	
			245		245	
			245		245	
		Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten		3.517		3.517
			31		31	
			31		31	
		Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi		11.022		13.022
			120		120	
			120		120	
			120		120	
			120		120	
			120		120	
		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi		24.313		25.000
			109		109	
			109		109	
			109		109	
			109		109	
			109		109	
		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif Program – WISMP		648		700
			51		51	
			51		51	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aset Irigasi (SISPAI)		155		355
			31		31	
			31		31	
			31		31	
			31		31	
		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten - Program DAK		6.000		6.000
			20		20	
			20		20	
			20		20	



No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-			
			2017		2018	
			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	5	6	7	8
			20		20	
			20		20	
		Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi - Bantuan Keuangan Provinsi		8.000		8.000
			42		42	
			42		42	
			42		42	
			42		42	
		Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dengan GP3A/P3A MC		3.169		3.169
			51		51	
			51		51	
			51		51	
			Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai		237	
		20		20		
4	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	47	10.000	47	10.000
			10,62	1.000	10,62	1.000
			37,5	80.000	37,5	80.000
		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase</b>	7,45	10.000	7,45	10.000
			37,5	1.500	37,5	1.500
		<b>Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	6	10.000	6	10.000
	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	44	200	44	200
			100	100	100	100
		Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi	80	100	80	100
		Updating SIPJAKI	1	50	1	50
		Sinergitas Rekomendas Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	50	1	50
		Sosialisasi Norma dan Aturan Jasa Konstruksi	100	100	100	100

## 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti diketahui mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, DINAS PEKERJAAN UMUM merupakan unsur pendukung



tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Walaupun tupoksi DINAS PEKERJAAN UMUM tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, namun berupaya mensinergikan perencanaan partisipatif dengan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga usulan kegiatan masyarakat dapat terakomodasi di SKPD terkait.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi dinas, dan juga renstra provinsi Jawa Barat yang tinjauan dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi melayani masyarakat terutama dalam bidang kebinamargaan, bidang pengairan, bidang bangunan dan penyehatan lingkungan oleh karena itu renstra kementerian yang ditinjau adalah renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya renstra Direktorat Jenderal Bina Marga. Renstra lain yang ditinjau adalah renstra Provinsi Jawa Barat dengan renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai pendukungnya.

##### **3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015 – 2019**

###### **A. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010–2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015–2019 adalah:

**“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan* yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :



1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

#### **B. Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang beraskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:



1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
  - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
  - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.



2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
  - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3 : Penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
  - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
  - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
  - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan



- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

### **C. Program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

**A. Program Teknis**, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

#### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA
- c. Pembinaan Program dan Anggaran
- d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah



- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- i. Dukungan Manajemen DSDAN
- j. Pembinaan Keamanan Bendungan
- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
- l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- n. Membangun dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
- o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
- p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

**2. Program Penyelenggaraan Jalan**, meliputi kegiatan–kegiatan :

- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
- c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
- d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
- e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
- f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
- g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan Kota Besar dan Bebas Hambatan
- h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

**3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**, meliputi kegiatan–kegiatan :

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
- b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
- c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
- d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
- f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman



- g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan

**4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur,** meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
- d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
- e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

**5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
- b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta
- c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
- d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
- e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
- g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN)
- h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

**6. Program Pengembangan Perumahan,** meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
- b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
- d. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- e. Penyediaan Rumah Susun

**7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah,** meliputi kegiatan–kegiatan :

- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Pengembangan Kawasan Strategis.
- d. Pengembangan Perkotaan.



- e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

**B. Program Generik**, merupakan program–program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan Rakyat

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;
- b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
- c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

**3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Penelitiandan Pengembangan Sub Bidang SumberDaya Air;
- b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
- c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
- d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.

**4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan–kegiatan:

- a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP



- b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
- d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

**5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:**

- a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

**3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga**

**A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga**

Program penyelenggaraan jalan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

***“TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN JALAN YANG ANDAL, TERPADU & BERKELANJUTAN DI SELURUH WILAYAH NASIONAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ”***

Makna dari visi tersebut adalah: Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan jaringan jalan yang yang andal, terpadu & berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusaha dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi Direktorat Jenderal bina Marga yang ditetapkan untuk periode tahun 2015 –2019 adalah:



1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga**

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Marga dan untuk mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum selama periode lima tahun ke depan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan serta mendukung RAN-MAPI (Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim).
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
3. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.
4. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
5. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara lebih efisien dan efektif.

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS
  - a. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 94%.
  - b. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan kilometer per tahun .



- c. Meningkatnya fasilitasi pembinaan pelaksanaan teknis penyelenggaraan jalan daerah menjadi sebesar 70 %.

## 2. SASARAN RINCI

Adapun sasaran rinci berdasarkan tujuan Direktorat jenderal Bina Marga yang akan dicapai meliputi:

Tujuan 1: Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim), dengan sasaran Tercapaiannya prosentase penyelenggaraan jalan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar 100 %.

Tujuan 2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dengan sasaran:

- a. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional sebesar 91,55 milyar kendaraan per tahun.
- b. Penurunan waktu tempuh rata-rata antar-Pusat Kegiatan Nasional sebesar 5%.
- c. Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap sebesar 94 %.
- d. Panjang Penambahan lajur kilometer pada ruas jalan nasional sebesar 13.000 lajur km.
- e. Panjang peningkatan kapasitas jalan sebesar 19.370 km.
- f. Panjang peningkatan kapasitas jalan nasional dengan spesifikasi jalan raya sebesar 400 km.
- g. Prosentase penyelesaian lebar jalan pada 4 (empat) Lintas Utama menjadi minimum lebar 7 m pada Lintas Timur Sumatera dan Lintas Pantura, dan 6 m pada Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi sebesar 100%.
- h. Prosentase pengurangan panjang jalan nasional sub-standar sebesar 10 %.
- i. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan di 150 lokasi.

Tujuan 3: Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan dengan sasaran:

- a. Panjang penambahan jaringan jalan bebas hambatan sebesar 700 km.
- b. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan dalam mendukung kerjasama ekonomi sub regional ASEAN sebesar 75 %.



Tujuan 4: Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana dengan sasaran:

- a. Terselenggaranya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis (kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal sepanjang 1.378 km.
- b. Prosentase berfungsinya kembali ruas-ruas jalan yang terkenda dampak pasca bencana sebesar 100 %.

Tujuan 5: Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien dengan sasaran :

- a. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan sebesar 100 %.
- b. Prosentase fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menjadi sebesar 70%.

### C. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi yang ditetapkan untuk Program Penyelenggaraan Jalan, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan diidentifikasi berdasarkan kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas-tugas Direktorat Jenderal Bina Marga yang tertuang dalam Undang – Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan matriks kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang, maka Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

1. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Jalan
2. Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan
3. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan
4. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan bebas Hambatan dan Perkotaan
5. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Barat
6. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Timur
7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Rincian Sub Kegiatan dan Outputnya dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Manajemen Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:



- a. Penanganan tanggap darurat
  - b. Reformasi Birokrasi
  - c. Pemenuhan SDM satker dari PNS Pusat
  - d. Legalisasi NSPK dan SOP
  - e. Inventarisasi dan revaluasi BMN
  - f. Pembinaan kelembagaan, administrasi dan keuangan
  - g. Penyiapan pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu
  - h. Pemenuhan Penilik jalan
- 2. Kegiatan: Perencanaan Pemograman Dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Program dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
- a. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan
  - b. Pengembangan sistem informasi dan manajemen jalan,
  - c. Penyediaan data dan informasi penyelenggaraan jalan
  - d. Penyusunan program & anggaran penyelenggaraan jalan
  - e. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah,
- 3. Kegiatan: Pembinaan Teknik Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Teknik dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
- a. Penyusunan Konsep NSPM Teknik Jalan dan Jembatan
  - b. Penyusunan dokumen lingkungan
  - c. Dukungan Perencanaan Teknik
  - d. Identifikasi penanganan lokasi rawan kecelakaan (defisiensi jalan) dan rawan bencana
  - e. Dukungan Bahan dan Perlatan
- 4. Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Serta Fasilitas Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Jalan bebas Hambatan dan Jalan Kota dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
- a. Perencanaan dan Pembinaan jalan & Jembatan Perkotaan
  - b. Pembangunan Jalan bebas Hambatan (baik oleh pemerintah atau swasta)
  - c. Perencanaan dan Pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan
  - d. Pengadaan Lahan
- 5. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Jalan & Jembatan Wilayah Barat.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Jalan & Jembatan Wilayah Barat dengan Sub- Kegiatan Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Barat



**6. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Perencanaan Teknik dan Pengawasan
- b. Preservasi Jalan dan Jembatan
- c. Peningkatan Kapasitas jalan
- d. Penerapan teknologi praktis dan pengendalian mutu dan keselamatan konstruksi,
- e. Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan,
- f. Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis dan Wilayah Tertinggal,

### **3.3.3 Renstra Direktorat Jendral Pengendalian Sumber Daya Air**

Kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi acuan bagi semua organisasi perangkat daerah termasuk Dinas PSDA Kabupaten Sukabumi.

Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Pemerintah Pusat memandang, bahwa Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air masih belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dikembangkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Pembaharuan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui perumusan kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya air. Pembangunan Sumber Daya Air (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-14/M.EKON/12/2001) terlihat jelas penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembaruan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dengan demikian visinya adalah :

**“Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan rakyat”.**

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu Pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian serta perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Hal itu selaras



dengan tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dalam mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006).

Sehingga dalam renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi sama-sama mengusung sasaran untuk tercapainya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari; tercapainya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; peningkatan dan pengembangan kelembagaan pemakai air; peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi; pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; peningkatan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat sumber daya air dengan meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya air.

#### **3.3.4 Renstra Direktorat Jendral Bina Konstruksi**

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah :

**“Keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia”**



Guna mewujudkan visi tersebut, maka Misi Direktorat Jendral Bina Konstruksi yang ditetapkan adalah :

1. Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi Indonesia,
2. Mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi Indonesia,
3. Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang

### **3.3.5 Renstra Direktorat Jendral Perumahan dan Tata Bangunan**

#### **A. Visi dan Misi**

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi ini, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditetapkan untuk periode tahun 2015 –2019 adalah:

- Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
- Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
- Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
- Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
- Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusakan sosial.
- Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**



Bertolak dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi, dimana kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah lebih diarahkan kepada sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah,

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

#### **A. Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

##### **1 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

Sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di wilayah Jawa Barat, visi Dinas Bina Marga disusun secara selaras vertikal maupun horisontal. Dengan dasar pemikiran tersebut Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

**“TERCAPAINYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP UNTUK  
MENDUKUNG MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS,  
DAN SEJAHTERA”**

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam arti penekanan kepada setiap SDM yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, agar mereka betul–betul matang dan ahli di bidangnya masing–masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepadanya, efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu diperlu-kan sumber daya manusia yang berpendidikan, ahli, bermoral, bermental kuat dan bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam sudut Agama Islam, profesional dapat dilihat dalam cuplikan ayat berikut "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan–Nya dengan barisan yang kokoh, bagaikan sebuah bangunan yang terkonstruksi dengan rapi." (As-Shaf: 4). Dalam penerapan maupun penyerapannya pekerjaan yang dilakukan secara profesional artinya "pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan keahliannya dan dikerjakan secara sungguh–sungguh (itqan) dan rapi (ihsan)" (HRThayalisi).

**Prasarana Jalan** adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan raya yang meliputi jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan. Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi yang mantap yang berarti suatu kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna dengan kriteria teknis tertentu.



Pengertian dari mandiri, dinamis, dan sejahtera sesuai dengan visi Gubernur Jawa Barat yang merupakan tujuan dari pelaksanaan tugas dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, diperlukan rumusan misi sehingga diperoleh panduan tentang apa yang harus dilaksanakan. Dengan latar belakang ini misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.
2. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan
3. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana
4. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan Jalan
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan

## **2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilannya perlu ditetapkan tujuan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing–masing misi dijabarkan sebagai berikut:

### **Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya aparat Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat yang agamis, dan professional dengan sasaran:

1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Bina Marga agar pekerjaan dapat dilakukan dengan bermutu, efektif dan efisien.

### **Misi 2: Mewujudkan Perencanaan Jalan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkesinambungan dengan sasaran terwujudnya rencana penanganan jalan yang efektif dan efisien.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terwujudnya hasil penanganan jalan yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dengan sasaran tersedianya perencanaan teknis penanganan jalan yang sesuai dengan aspek teknis dan lingkungan.

### **Misi 3: Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana**



Tujuan yang akan dicapai adalah terpertahankannya kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang direncanakan dengan sasaran terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan provinsi.

**Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya jaringan jalan yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik dengan sasaran terselenggaranya peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terciptanya aksesibilitas yang tinggi yang mampu menghubungkan dua atau lebih simpul jalan/kota dengan sasaran terselenggaranya pembangunan jalan dan jembatan.

**Misi 5: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan**

Tujuan yang akan dicapai adalah pemanfaatan pada ruang pengawasan jalan (Ruwasja) sesuai dengan perUndang – Undang yang berlaku dengan sasaran meningkatnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan sesuai dengan perUndang – Undang yang berlaku.

**3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga disusun dengan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Barat yang telah disampaikan dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2014–2018. Rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:
  - Pembangunan Jalan
  - Pembangunan Jembatan
  - Peningkatan Jalan
  - Penggantian Jembatan
  - Pembebasan Lahan
  - Perencanaan pembangunan jalan.
  - Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:
  - Rehabilitasi Jalan
  - Rehabilitasi Jembatan
  - Pemeliharaan jalan
  - Pemeliharaan Jembatan



- Perbaikan badan jalan
  - Pekerjaan drainase
3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
    - Sistem Manajemen Jaringan Jalan (*Inter Urban Road Management Systems/IRMS*)
    - Sistem Manajemen jembatan (*Bridge Management Systems / BMS*)
  4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan:
    - Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija)
    - Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang.
    - Pengawasan pemanfaatan jalan dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)
  5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan:
    - Pengadaan peralatan untuk pemeliharaan jalan
    - Pembangunan gedung workshop
    - Pengadaan peralatan untuk pengujian mutu jalan.
  6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
    - Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam.
  7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:
    - Peningkatan kemampuan aparaturnya
  8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
    - Penyelenggaraan administrasi perkantoran
  9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
    - Pengadaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
  10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
  11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
    - Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  12. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan:
    - Peningkatan Pengelolaan dan Perlengkapan Kearsipan.

#### 4 Indikator Kinerja



Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian visi, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator ini direpresentasikan dalam kondisi jalan mantap dan tidak mantap. Pengertian tingkat pelayanan ruas jalan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan pengertian ruas jalan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan yang dalam kenyataannya sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Berdasarkan kriteria kondisi jalan di atas, tingkat kemantapan kondisi jalan provinsi di Jawa Barat pada Desember 2008 sebesar 88,16% dengan rincian kondisi baik 34,92%, kondisi sedang 53,24%, dan kondisi rusak ringan serta rusak berat 11,84%. Berdasarkan hal tersebut ditargetkan kemantapan jalan pada akhir tahun 2013 yaitu 93 – 94% dengan Target Midterm sebesar 91 – 92%. Rencana indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III. 4 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	Tingkat kemantapan Jalan	97.40	97.50	97.60	97.70	97.80
2.	Terciptanya pemanfaatan dan pengguna bagian-bagian jalan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan	Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja sesuai dengan aturan yang berlaku	97.00	98.80	100	100	100

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

## **B. Renstra Dinas Pengairan Provinsi Jawa Barat**

### **1. Visi dan Misi Dinas Pengairan Provinsi Jawa Barat**



## Visi

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan selaras dengan visi Kementerian PU, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu :

### **INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN**

Adapun sebagai penjelasan termaksud dari “ *Visi* ” tersebut adalah sebagai berikut :

*Infrastruktur* : diartikan Prasarana bidang sumberdaya air yang dikelola oleh Dinas PSDA  
*Sumber daya air dan Irigasi* : diartikan aktivitas Dinas PSDA yaitu mengelola sumberdaya air dan irigasi sebagai obyeknya.

*Andal* : diartikan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aparatur yang memadai memiliki kemampuan yang ada mampu melakukan pengelolaan sumberdaya air

*Berkelanjutan* : diartikan pengelolaan sumberdaya air berkesinambungan dan terus menerus dari tahun ke tahun mulai dari RPJMD ke RPJP selanjutnya karena air sebagai kebutuhan hidup yang vital dan esensial.

## Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan dan selaras.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu :

**Misi 1** : Mengembangkan kebijakan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

**Misi 2** : Meningkatkan Kapasitas Sumber daya manusia dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

**Misi 3** : Meningkatkan upaya konservasi, Pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air

**Misi 4** : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan irigasi.

**Misi 5** : Meningkatkan Ketersediaan serta kualitas data dan sistem informasi Sumberdaya air

## C. Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

### 1. Visi dan Misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN**



## BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN, DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan keterpaduan multisektor.
2. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan
3. Perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
5. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan bantuan teknis, pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum**

Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan bersifat jangka panjang, serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Sedangkan sasaran merupakan gambaran nyata yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih bersifat spesifik, kuantitatif terukur, berorientasi ke hasil, dan dapat dicapai dalam kerangka waktu relatif singkat (misal tahunan). Adapun Tujuan dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi yaitu :

3. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional



4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

6. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
8. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air
9. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
10. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi

Proses penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sebagai kelanjutan dari penyusunan faktor-faktor kunci keberhasilan. Setiap faktor kunci keberhasilan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan. Setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran- sasaran dan setiap sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan dijabarkan kedalam program-program.

### 3.6. Program dan Kegiatan

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dengan tetap mengacu pada program pembangunan (86) program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten sukabumi 2016-2021.

Dari 86 program tersebut, terdapat 12 program utama dan 5 program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan keterkaitannya dengan

**Tabel III.1 Program Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018**

Program Utama	Program Penunjang
1. Program Jalan dan Jembatan	1. Program Pelayanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Administrasi Perkantoran;
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



4. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	
7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi	

Pada hakekatnya tiga belas program Dinas Pekerjaan Umum di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum pada periode lima tahun ke depan (2016–2021). Masing–masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indikator output serta indikasi biaya. Rincian Rencana Program/ kegiatan untuk tahun 2018 untuk Sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel: III.2RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Dinas PU
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				Pelayanan Administrasi Kepegawaian	
				Pelayanan Administrasi Aset	
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				Pengadaan Mebelair	
				Pemeliharaan/Pengelolaan peralatan dan perlengkapan alat-alat labortorium	
				Pengadaan alat-alat laboratorium	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	
			Persentase Disiplin Aparatur	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	
			Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Pendidikan dan pelatihan formal	
			Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Penyusunan program, evaluasi, pelaporan capaian kinerja program dan kegiatan	
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	program jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan	
			Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten Pembuatan Dok Amdal Pembuatan Dok DED Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Alternatif	
			Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)	
			ketersediaan sarana pengelolaan jalan	pengadaan sarana pengelolaan jalan Pengadaan Alat Berat	
			Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak) Pembuatan Dok Fisibility Study (FS) Pembuatan Dok Amdal Pembuatan Dok DED Pengadaan Lahan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Jalan Alternatif	
			Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan lintas palabuhanratu-cisolok	
				Pembuatan Dok Amdal	
				Pembuatan Dok DED	
				Pengadaan Lahan	
				Pembangunan Jalan Alternatif	
			Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan cibutun-balewer	
				Pembuatan Dok Amdal	
				Pembuatan Dok DED	
				Pengadaan Lahan	
				Pembangunan Jalan Alternatif	
			Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan Situhiang – Mareng	
				Pembuatan Dok Amdal	
				Pembuatan Dok DED	
				Pengadaan Lahan	
				Pembangunan Jalan Alternatif	
			pelayanan informasi tentang Infrastruktur	<b>program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	
				Perencanaan Jalan	
				Perencanaan Jalan Jembatan	
				Survey kondisi data jalan	
				Survey kondisi data jembatan	
				Survey Menggunakan IRI	
			Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	
			peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarannya		
			Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			<i>Tersedianya data dan kondisi sarana dan prasaranan sumber daya air</i>	Kegiatan Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA)	
			Data Infrastruktur SDA		
			Profil Daerah Irigasi		
		Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air	Pengembangan GIS		
			<i>Terjaganya sumber pasokan air baku irigasi</i>	Kegiatan Pengendalian dan Daya Rusak Air	
			Talud		
			TPT		
			Pasangan Bronjong		
			<i>Terjaganya ketersediaan air baku irigasi</i>	Kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Bendung	
			Perbaikan Bendung		
				Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			Bangunan Embung		
			Bangunan Embung	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			<i>Meningkatnya kebersihan dan keindahan sungai</i>	Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten	
			Galian Sedimen		
			Pembersihan Sampah		
			Babandan Rumput		
			Pengamanan Tanggul		
			<i>Tersedianya dokumen desain dan perhitungan rencana pekerjaan sumber daya air</i>	<i>Perencanaan Teknis Sumber Daya Air</i>	
			Sistem Planning		
		DED			
		RAB			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			Gambar		
			Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten	<i>Terjaganya kondisi dan fungsi jaringan irigasi pada areal kewenangan kabupaten</i>	
			Operasi Jaringan Irigasi		
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi		
			<i>Terlaksananya peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi</i>	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi	
			Bangunan Air		
			Saluran Pasangan		
			TPT		
			Normalisasi Saluran		
			Pasangan Bronjong		
			Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	<i>Terlaksananya pengembalian kondisi dan fungsi jaringan irigasi</i>	
			Bangunan Air		
			Saluran Pasangan		
			TPT		
			Normalisasi Saluran		
			Pasangan Bronjong		
			<i>Terlaksananya pelatihan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dengan P3A Mitra Cai</i>	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif Program - WISMP	
			Pelatihan Desain Partisipatif		
			Pelatihan Perbaikan Partisipatif		
			<i>Terlaksananya pengelolaan data aset irigasi secara elektronik</i>	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aset Irigasi (SISPAI)	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			Data AKNOP		
			Data AKNPI		
			Skema Jaringan		
			Indikator Kinerja Sistem Irigasi		
			Data Kondisi Jaringan Irigasi		
			<i>Terlaksananya pengembalian kondisi dan fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK</i>	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten - Program DAK	
			Bangunan Air		
			Saluran Pasangan		
			TPT		
			Normalisasi Saluran		
			Pasangan Bronjong		
			<i>Terlaksananya pengembalian kondisi dan fungsi jaringan irigasi melalui dana Bantuan Keuangan Provinsi</i>	Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi - Bantuan Keuangan Provinsi	
			Bangunan Air		
			Saluran Pasangan		
			TPT		
			Normalisasi Saluran		
			Pasangan Bronjong		
			<i>Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi bersama P3A Mitra Cai</i>	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dengan GP3A/P3A MC	
			Pembentukan P3A/GP3A		
			Pelaks. Desain Partisipatif		
			Pelaks. Perb. Partisipatif		
			<i>Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi</i>	Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			<i>bersama P3A Mitra Cai</i>		
			Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Petani Pemakai Air/ P3A MC		
			Cakupan layanan air minum perdesaan	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	
			cakupan pelayanan air minum perkotaan	Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan	
				Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perkotaan	
				Penyediaan Sistem Pelayanan Air Minum	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	
				Sinergitas Sistem Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	
				cakupan pelayanan air limbah domestik	Penyediaan Sanitasi Masyarakat MCK
			Sinergitas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)		
			Review Memorandum Pembangunan Sanitasi		
			Infrastruktur air limbah dengan sistem on site		
			Infrastruktur air limbah dengan sistem Setempat dan Sistem Komunal		
			Penyediaan infrastruktur IPAL Komunal dan MCK Kombinasi		
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian	meningkatkan kondisinya sarana dan prasarana dasar permukiman		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase</b>	
			Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota		
			Pengurangan Luas Genangan	Penyusunan Masterplan Drainase	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Unit Kerja PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Drainase Perkotaan	
				Pembangunan Kolam Retensi	
				<b>Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Penyusunan Database Bangunan Gedung Negara	
				Sinergitas Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	
				Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan	
				Pembangunan PUSBANGDA'I Kabupaten Sukabumi	
		Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi		<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	
			cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi		
			cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi	
				Updating SIPJAKI	
				Sinergitas Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
				Sosialisasi Norma dan Aturan Jasa Konstruksi	



#### **IV. PENUTUP**

Renja Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 1(satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai Tupoksinya.



# LAMPIRAN

**FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
TAHUN 2018**

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	50,85%	Program Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Terpeliharanya Utilitas Jalan Kabupaten 131 unit	%	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat 100 %	
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Secara Rutin 278,48 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 23,50 %	
				Pemeliharaan Periodik Jalan	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Secara Periodik 9,35 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 0,79 %	
				Peningkatan/ Pembangunan Jalan Kabupaten	Meningkatnya Struktur Jalan 61,43 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 5,18 %	
				DAK Reguler Bidang Jalan Pendukung Konektifitas (DAK Reguler)	Meningkatnya Struktur Jalan 1,30 %	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 1,15 %	
				Jalan dan Jembatan (PIK Sektoral)	Meningkatnya Struktur Jalan 8,16 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 0,69 %	
				Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	Tersosialisasinya Rumija 47 Kecamatan	%	Pemahaman Rumija 60 %	
				Fasilitasi Jalan Desa	Memfasilitasi Perangkat Pengelola Jalan Desa 381 Desa	%	Terfasilitasi Perangkat pengelola Jalan Desa 90 %	
				Pemeliharaan Periodik Jembatan	Mempertahankan umur jembatan 55,10 m	%	Mempertahankan kondisi baik dan sedang 4,65 %	
				Peningkatan/ Pembangunan Jembatan	Meningkatkan Kondisi Jembatan 10 m	%	Mempertahankan kondisi baik dan sedang 0,84 %	
				Peningkatan/ Pembangunan Trotoar Jalan	Terbangunnya Trotoar Jalan 3,50 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 0,30 %	
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan (DBH Pajak Rokok 2018)	Terpeliharanya Jalan Kabupaten 153,67 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 12,97 %	
				DAK Rguler Bidang Jalan Prioritas Daerah (DAK Reguler)	Meningkatnya Struktur jalan 6,80 Km	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap 0,57 %	
				Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Meningkatnya Struktur jalan	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap	
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Meningkatnya Struktur jalan	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap					
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Meningkatnya Struktur jalan	%	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap					

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perencanaan Jalan	Tersusunnya Perencanaan Jalan, Dokumen engineering estimate, Rencana Gambar, Analisa harga, Dokumen lelang, Hasil survey Perencanaan Teknis 2018 6 dok	Dok	Tersusunnya Perencanaan Jalan 6 dok	
				Perencanaan Jembatan	Tersusunnya Perencanaan Jembatan, Dokumen engineering estimate, Rencana Gambar, Analisa harga, Dokumen lelang, Hasil survey Perencanaan Teknis 2018 6 dok	Dok	Tersusunnya Perencanaan Jembatan 6 dok	
				Pembuatan Dokumen Konsultasi Jalan dan Jembatan (DBH Pajak Rokok 2018)	Tersedianya Dokumen FS 2 dok	Dok	tersedianya Dokumen Perencanaan 2 dok	
				Pembuatan Dokumen Konsultasi Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen FS 1 dok	Dok	Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dok	
Meningkatnya Infrastruktur Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Irigasi Untuk Konservasi, Pendayagunaan Sumberdaya Air, Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	68 %	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Eksplorasi Jaringan Irigasi	Terwujudnya operasi jaringan irigasi 156 DI	DI	Kalibrasi, RTTG, Bahan Banjiran 156 DI	
				Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengguna Air (P3A/GP3A Mitra Cai)	Pembinaan kelembagaan P3A mitra cai 12 bln	%	Meningkatnya kapasitas P3A Mitra Cai 100 %	
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya Saluran Irigasi 6.227 Ha	%	Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Mantap 21,73 %	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aset Irigasi (SISPAI)	Terwujudnya peningkatan partisipasi kelompok P3A/GP3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi 12 bulan	Dok	Dokumen AKNPI, Dokumen AKNOP, Skema Jaringan, Data Kondisi Jaringan, Data Kebutuhan Pemeliharaan 5 dok	
				Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi	Terwujudnya peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi 1.780 Ha	%	Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Mantap 6,21 %	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terwujudnya perbaikan jaringan irigasi 4.337 Ha	%	Meningkatnya Kondisi Jaringan irigasi mantap 15,14 %	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)	Tersusunnya Naskah Akademik Perda tentang Irigasi 1 dok	Dok	Tersedianya Naskah Akademik Perda tentang Irigasi 1 dok	
				DAK Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK Penugasan 2018)	Terwujudnya peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi 750 Ha	%	Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Mantap 2,62 %	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersebar di Kabupaten Sukabumi (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Terwujudnya perbaikan jaringan irigasi	%	Meningkatnya Kondisi Jaringan irigasi mantap	
				Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dok	Dok	Terciptanya Perencanaan Irigasi 1 dok	
Meningkatnya Kondisi Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Layanan Air Minum Perdesaan	52%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Sarana dan Prasarana Air Bersih 57.266,07 m	%	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih 100 %	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PIK Sektoral) (DBH Pajak Rokok)	Terbangunya Sarana dan Prasarana Air Bersih 14.077,97 m	%	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih 100 %	
				Sinergitas Sistem Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	Terfasilitasinya Kegiatan Pendamping PAMSIMAS 12 desa	%	Terlaksananya Pendamping PAMSIMAS 12 desa	
	Cakupan Pelayanan Air Minum Perkotaan	16,66%		DAK Penugasan Bidang Air Minum (DAK Penugasan 2018)	Teroptimalisasinya SPAM IKK 40 Ltr/dt	%	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum 1 lokasi	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perkotaan	Tersedianya Air Minum Perkotaan 3 Kecamatan	%	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih 100 %	
				Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK)	Terbangunnya MCK 196 unit	%	Meningkatnya Cakupan Jamban Keluarga 100 %	
	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	38,5 %		DAK Penugasan Bidang Sanitasi (DAK Penugasan 2018)	Terbangunnya IPAL	%	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Limbah	
				Penyediaan Sanitasi Masyarakat (MCK) (DBH Pajak Rokok 2018)	Terbangunnya MCK 18 unit	%	Meningkatnya Cakupan Jamban Keluarga 100 %	
				Sinergitas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)	Terfasilitasinya Kegiatan Pendamping SANINMAS 12 desa	%	Terlaksananya Pendamping SANINMAS 12 desa	
				Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih	Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dok	Dok	Terciptanya Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih 1 Dok	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Jarinagn Drainase	1 Km	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Pembangunan Drainase Perkotaan (DBH Pajak Rokok 2018)	Tersedianya Drainase Perkotaan 6 Unit	Unit	Terbangunnya Drainase 6 unit	
	Masterplane Drainase	1 Dok		Penyusunan Outlineplan Drainase	Dokumen Outlinepla Drainase 1 dok	Dok	Tersedianya Drainase Perkotaan 59 unit	Tersedianya Drainase Perkotaan 59 unit
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		6,50%	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendataan Standar Harga Satuan Bangunan	Dokumen Standar Harga Satuan Bangunan 1 dok	Dok	Tersedianya Pedoman Standar Harga Satuan Bangunan 1 dok	
				Pembangunan Gedung	Terbangunnya Gedung Kantor 17 unit	Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 17 unit	
				Pembangunan Gedung (DBH Pajak Rokok 2018)	Terbangunnya Gedung Kantor 2 Unit	Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2 unit	
				Pembangunan Gedung Graha Pemuda (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Terbangunnya Gedung Graha Pemuda 2 Unit	Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Graha Pemuda 2 unit	
				Pembangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu 1 Unit	Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu 1 unit	
				Perencanaan dan Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 1 Unit	Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 1 unit	
				Pembuatan Dokumen Konsultasi Gedung Perkantoran	Tersedianya Dokumen Perencanaan 16 dok	Dok	Terciptanya Perencanaan Gedung 16 dok	
				Perencanaan Pembangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Perencanaan 17 dok	Unit	Terciptanya Perencanaan Gedung 17 dok	
				Pembuatan Dokumen Konsultasi Perkantoran	Tersedianya Dokumen Perencanaan 2 dok	Dok	Terciptanya Perencanaan Gedung 2 dok	
				Cakupan Pelayanan Izin Usaha Jasa		53%		Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi (DBH Pajak Rokok)

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Konstruksi (IUJK)		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Sinergitas Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Fasilitasi Ijin Usaha Jasa Konstruks 12 bln	%	Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
	Updating SIPJAKI	100%		Sosialisasi Norma dan Aturan Jasa Konstruksi (DBH Pajak Rokok)	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa	%	Meningkatnya pelayanan informasi jasa konstruksi 100 %	
				Updating SIPJAKI	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa	%	Meningkatnya pelayanan informasi jasa konstruksi 100 %	